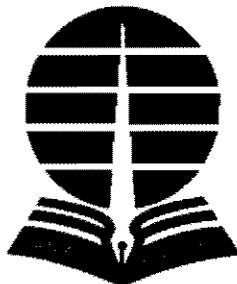


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUK
PERTANIAN TANAMAN PANGAN MELALUI
PENGEMBANGAN MANAJEMEN STRATEGI
DI KABUPATEN BUTON**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

**LA HARUNA
NIM. 014937906**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2009**

ABSTRAK

KEBLIJAKAN PENINGKATAN PRODUK PERTANIAN TANAMAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN STRATEGI DI KABUPATEN BUTON

La Haruna
Universitas Terbuka
Laharunaharuna@yahoo.com

Kata-Kata Kunci: Kebijakan Pertanian dan Manajemen Strategi

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang tepat dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton melalui penerapan kebijakan manajemen strategik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) memperoleh gambaran yang jelas mengenai potensi, sumberdaya dan tantangan, kendala maupun peluang dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan Kabupaten Buton menyosong otonomi luas, dan (2) menemukan strategi yang tepat bagi pengembangan pertanian tanaman pangan secara integral di Kabupaten Buton.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif guna menggambarkan dan mengungkap isu-isu strategik kebijakan peningkatan produk pertanian secara mendalam. Informan penelitian ini terdiri dari: 5 orang pegawai Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buton, 4 ketua anggota kelompok tani, 5 orang anggota Koperasi yang bergerak di bidang pertanian, 3 orang pengusaha yang bergerak di bidang bisnis hasil bumi. Instrumen penelitian yang digunakan pedoman wawancara, studi dokumentasi dan *check-list*. Prosedur pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui (1) inventarisasi data sekunder, (2) pembuatan draf kasar pedoman (3) analisis data guna menjawab permasalahan penelitian ini dilakukan dengan SWOT analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengembangan sektor pertanian tanaman pangan pada komoditi yang sesuai dengan karakter tanah & iklim di kabupaten Buton adalah padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, (2) temuan strategi bagi pembangunan sektor pertanian tanaman pangan adalah mengintegrasikan semua komponen yang ada dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, (3) program Dinas Pertanian Tanaman Pangan terbukti berhasil meningkatkan sektor pertanian, (4) salah satu strategi untuk mengatasi belum optimalnya pengembangan pertanian tanaman pangan secara terpadu adalah dengan melakukan penyuluhan secara tepat bagi pengolahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas, (5) sarana dan prasarana penunjang kegiatan agribisnis secara keseluruhan belum optimal terutama membuka akses pasar sentra produksi pertanian tanaman pangan, (6) temuan bagi strategi yang tepat adalah memberikan kesempatan bagi investor swasta untuk mengembangkan ini melalui kemudahan izin, dan memberikan keleluasan petani dalam menggunakan teknologi maupun jenis pupuk yang ada.

Kesimpulan temuan hasil dalam penelitian ini ialah kebijakan pertanian tanaman pangan dapat meningkatkan produksi tanaman pangan di Kabupaten Buton.

ABSTRACT**The Policy on Increasing of Crop Production
through Development of Strategic Management
in Buton Regency**

La Haruna
Universitas Terbuka
laharunaharuna@yahoo.com

Key Words: Management strategy and farm policy

This research aims at finding effective management strategy to increase crop production in Buton regency. The purpose of this research are: First, this research tries to obtain comprehensible descriptions on potencies, resources, challenges, obstacles, and opportunities in developing crop sector in Buton regency to respond to outonomy granted to the regency. Second, this research attempts to develop integral strategy management to increase crops production. in Buton Regency.

This research was use descriptive approach which describes and deeply explores strategic issues of policy in increasing the crop product. Data for this research were collcteted through informants. The informants were 5 persons from Horticulture Board of Buton Regency, 4 leaders of farmers' groups, 5 persons from agricultural society, and 3 entrepreneurs in crops farming business. Data from the infromants were collected though interviews which later on recorded. Study documentation and check list were also employed to collect data. Data analysis were done through SWOT analysis.

There are six results of the research. First, rice, corn, soyabean, sweet potatoes, and ketella are crops suitable with land character and climate in Buton. Second, integrating related components in crop production will most benefit the crop production increasing program. Third, programs developed by the Buton Horticultural Board has been succeed in increasing production of crop sector. Fourth, one of the effective strategies to overcome the poor performance of crop production is through continuous illumination on effective ways to process agriculture land. Fifth, tools and devices to support agribussines activities was not optimal yet, particularly in opening access for central marketing of crops products. Sixth, one of effective strategies to increase crop production is by involving private investors to develop the program by facilitating permit, providing technology, and using fertilizers.

In conclusion policy on crop production could increase crops production in Buotn regency.

NIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJAN
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Kebijakan Peningkatan Produk Pertanian Tanaman Pangan Melalui Pengembangan Manajemen Strategi di Kabupaten Buton adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan Adanya penjiplakan (Plagiat), maka saya bersedia Menerima sanksi akademik

Kendari, Desember 2009

Yang Menyatakan



(La Haruna)
NIM. 014937906

UNIVERSITAS TERBUKA

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUK PERTANIAN TANAMAN
PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN STRATEGI DI
KABUPATEN BUTON

Nama : La Haruna
NIM : 0149379406
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyetujui :

Pembimbing I,



Muh. Oudrat Nugraha, Ph.D., M.Si.

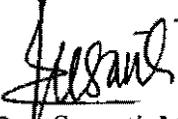
Pembimbing II,



Dr. Yuni Tri Hewindati
NIP. 195906171986092001

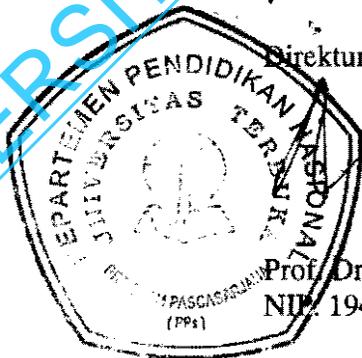
Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP
Program Magister Administrasi
Publik



Dra. Susanti, M.Si
NIP. 196712141993032002

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Udin S. Winatapura, MA.
NIP. 194510071973021001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : La Haruna
 NIM : 014937906
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Kebijakan Peningkatan Produk Pertanian Tanaman Pangan Melalui Pengembangan Manajemen Strategi di Kabupaten Buton

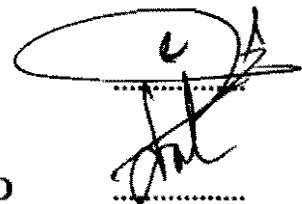
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Desember 2009
 Waktu : 10.00-12.00 wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Drs. Wawan Ruswanto, M.Si
 Penguji Ahli : Prof. Dr. Karsadi, M.Si
 Pembimbing I : Muhammad Qudrat Nugraha, Ph.D
 Pembimbing II : Dr. Yuni Trisnawindati


UNIVERSITAS TERBUKA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Karena atas rahmat dan berkatnya jualah, sehingga dapat menuangkan segala pikiran dan kemampuan untuk menyelesaikan TAPM yang berjudul “Kebijakan Peningkatan Produk Pertanian Tanaman Pangan Melalui Pengembangan Manajemen Strategi di Kabupaten Buton”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini masih memiliki keterbatasan pengetahuan dari segi metodologi maupun tata bahasa, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan TAPM ini sangat diharapkan.

Dalam upaya menyusun dan menyelesaikan TAPM ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu, tidak ada yang dapat kami berikan selain ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

- (1) Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka.
- (2) Drs. Wawan Ruswanto, MSi Selaku Kepala UPBJJ-UT Kendari.
- (3) Drs. Muh. Qudrat Nugraha, Ph.D. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka kesempurnaan TAPM.
- (4) Dr. Yuni Tri Hewindati selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga penulisan TAPM ini.
- (5) Prof. Dr. Karsadi, M.Si. Dosen Tutorial Universitas Terbuka UPBJJ-UT Kendari sebagai teman diskusi dalam penulisan TAPM ini.
- (6) Prof. Dr. Udin Sarifudin Winataputra, MA. Selaku direktur Program Pascasarjana yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan dengan jalan memberikan kemudahan dan kebijaksanaan dalam administrasi untuk meneruskan tahap demi tahapan dalam penulisan TAPM ini.
- (7) Suciati, Ph.D selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan TAPM ini.

- (8) Terima kasih kepada Dosen UPBJJ-UT Kendari yang telah merencanakan dan sukses dalam pemberian arahan dalam rangka OSMB Angkatan. I UPBJJ-UT Kendari yang pelaksanaannya di Bau-Bau SULTRA tahun 2007 yang dihadiri Dosen UT-Pusat, Bapak Dr. Surahman Dimiyati, M.Ed.
- (9) Segenap para Dosen tutorial di lingkungan UPBJJ-UT Kendari. Kerja sama para dosen Program Pascasarjana Universitas Haluoleo Kendari
- (10) Istimewa Isteri tercinta, Wa Ode Naharia, A.Md yang telah banyak memberikan dukungan lahir batin untuk menata dinamika kehidupan masa depan bagi anak-anak tersayang.
- (11) Teman-teman se-Angkatan UPBJJ-UT Kendari (angkatan I Tahun 2007) yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam penulisan ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri semoga semua partisipasi yang diberikan dari Bapak/ Ibu, Sdr/ Sdri kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal

disisinya, semoga tulisan ini juga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, bangsa dan negara, Amin.

Kendari, Desember 2009

Penulis

La Haruna

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan TAPM.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Bagan	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	6
1. Konsep Kebijakan	6
2. Pengelolaan Agribisnis.....	9
3. Faktor yang mempengaruhi Pengembangan Agribisnis	12
4. Hambatan dan Peluang Pengembangan Agribisnis.....	22
5. Konsep Peningkatan Tanaman Pangan	25
6. Wawasan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan	30
7. Peningkatan Sektor Pertanian Tanaman Pangan.....	34
8. Pengertian dan Penerapan Manajemen Strategik.....	38
9. Visi dan Misi	45
10. Lingkungan Eksternal	46
11. Identifikasi Isu Strategi	47
B. Kerangka Berpikir	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	51
B. Informan Penelitian	51
C. Instrumen Penelitian.....	51
D. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian	52
E. Teknik Analisis Data	53
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Potensi, Sumberdaya dan Tantangan, Kendala maupun Peluang dalam Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Buton.....	55

B. Analisis Isu Strategis.....	77
C. Analisa SWOT.....	89
D. Ringkasan Matriks SWOT.....	96
E. Matriks SWOT dan Penjabaran Isu Strategis Hasil Temuan.....	98
F. Matriks SWOT dan Identifikasi Isu Strategis.....	101
G.Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton.....	102
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1. Kerangka Pikir	50
Bagan 3.1. Diagram Matriks SWOT	53
Bagan 4.1. Ringkasan Matriks SWOT	97
Bagan 4.2. Matriks SWOT Pengembangan Sektor Pertanian.....	100

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Luas Penggunaan Tanah Setiap Kecamatan tahun 2007	56
Tabel 4.2. Banyaknya Rumah Tangga Pertanian, Tahun 2008	63
Tabel 4.3. Luas Tanam, Panen, Produktivitas tahun 2005-2007	66
Tabel 4.3 Volume dan Nilai Perdagangan antar Pulau tahun 2005-2007	75
Tabel 4.5. Jumlah Pasar Menurut Jenisnya Tiap Kecamatan Tahun 2008...	76
Tabel 4.6. PDRB Kabupaten Buton tahun 2006-2007	88

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Panduan wawancara.....	111
2. Transkrip hasil wawancara.....	114

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), merupakan wahana untuk mensinergikan seluruh upaya pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh berbagai tingkatan pemerintah, yaitu pusat (kementerian dan lembaga), Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Arah pembangunan pertanian Kabupaten Buton mengacu pada tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini sesuai visi dan misi Kabupaten Buton yang jabarkan di dalam visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Buton, yaitu “mewujudkan swasembada pangan yang berbasis pewilayahan komoditas secara proporsional dan berkeadilan sesuai potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan petani”.

Upaya pembangunan pertanian ini perlu dilakukan secara simultan dan terintegrasi menyeluruh serta berkelanjutan, baik yang terkait dengan sisi penawaran (produksi) maupun sisi permintaan pasar. Pembangunan pertanian tersebut dilakukan melalui pengembangan dan peningkatan produktivitas hasil-hasil usaha tani yang dicapai maupun pengelolaan dan pemasarannya.

Sasaran pembangunan kegiatan ekonomi pertanian harus sejalan dengan sasaran pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Buton secara keseluruhan, dengan mewujudkan optimalisasi produktivitas bidang pertanian secara umum yang berbasis

agribisnis, proporsional dan berkeadilan dengan menggunakan teknologi tepat guna, ramah lingkungan serta efisien dan efektif, sehingga sektor pertanian dapat berkembang lebih pesat serta melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal, sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi pertanian dalam perekonomian Kabupaten Buton.

Keberhasilan pembangunan pertanian Kabupaten Buton dapat diarahkan melalui: (1) peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan mutu serta kualifikasi tenaga kerjanya; (2) peningkatan produktifitas yang diukur dengan capaian produktifitas dari setiap komoditas permusim panen; (3) peningkatan daya saing diukur dengan peningkatan pangsa pasar pertanian, peningkatan perdagangan lintas daerah, peningkatan nilai tambah dari produk pertaniannya serta keragaman usaha tani yang ditekuni; (4) berkembang dan meningkatnya usaha tani yang diukur melalui peningkatan jumlah investasi, jumlah omset penjualan, perluasan usaha berupa diversifikasi produk, peningkatan jaringan/mitra usahanya, stabilitas usaha dan etos kerja yang tinggi (Anonim, 2008: 2).

Komitmen pemerintah untuk memberdayakan sektor pertanian dapat diukur dengan: (1) meningkatnya porsi pembiayaan APBD dan APBN) untuk pembangunan pertanian, yaitu sekurang-kurangnya 10 % pertahun; (2) meningkatnya kapasitas institusi pembina untuk pengembangan dan pemberdayaan sektor pertanian, (3) meningkatnya partisipasi masyarakat dan para pihak dalam pembangunan pertanian (Anonim, 2008: 2).

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Keputusan Bupati Buton Nomor 1313 tahun 2004 maka Dinas Pertanian Kabupaten Buton sesuai dengan amanat Undang-Undang SPPN menyusun rencana kerja pada setiap tahunnya guna mendukung kegiatan pembangunan pertanian.

Walaupun amanat undang-undang SPPN telah dilaksanakan yang didukung oleh Perda No. 1 Tahun 2004 di atas, hasil komoditi tanaman pangan yang dikembangkan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Data menunjukkan bahwa data produksi tahun 2006 produksi padi sawah mencapai 4.342 ton, padi ladang 8.970 ton, jagung 24.747, ubi kayu 97.553, ubi jalar 3.657 ton, kacang tanah 809, kacang kedelai 367 ton, kacang hijau 2007 ton bila dibandingkan produksi tahun 2007, produksi padi sawah mencapai 5.502 ton, padi ladang 8.178 ton, jagung 17.305 ton, ubi kayu 73.363 ton, ubi jalar 2.685 ton, kacang tanah 771 ton, kacang kedelai 687 ton, kacang hijau 96 ton.

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Buton di bidang pertanian belum mampu mengangkat produksi hasil pertanian yang ada. Atas dasar ini penulis tertarik untuk meneliti kebijakan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan melalui penerapan manajemen strategis di Kabupaten Buton.

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya perubahan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia terutama menyangkut pelaksanaan otonomi luas, maka dibutuhkan kesiapan dan penerapan strategi yang tepat dari daerah untuk mengimplementasikan proses pembangunan secara efektif bagi kesejahteraan dan kemandirian daerah. Kemandirian daerah sebagai konsekuensi logis dari penerapan otonomi sehingga optimalisasi penggunaan sumberdaya yang dimiliki harus dilakukan secara integral.

Dari sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan, diharapkan Kabupaten Buton mampu mengoptimalkannya sebagai salah satu komponen pembangunan yang dapat digunakan bagi kesejahteraan rakyatnya. Sektor tanaman pangan ini diharapkan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja, sekaligus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang hidup dan berusaha di sektor ini.

Dari ulasan singkat tersebut, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana strategi yang tepat dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton melalui penerapan teknik manajemen strategik?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai potensi, sumberdaya dan tantangan, kendala maupun peluang dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan Kabupaten Buton menyosong otonomi daerah.

2. Menemukan strategi yang tepat bagi pengembangan pertanian tanaman pangan secara integral di Kabupaten Buton.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis.

1. Secara akademik penelitian ini dapat memberikan input bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik berkaitan dengan aspek kebijakan publik .
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi :
 - a. bahan informasi bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam meningkatkan produk pertanian tanaman pangan.
 - b. Sebagai input bagi pemerintah dalam menyusun Propeca di Kabupaten Buton di bidang sektor pertanian tanaman pangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Konsep Kebijakan

Istilah *policy* atau kebijakan dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. E. Hugh Hecl dalam Charles (1977) mengatakan bahwa kebijakan adalah cara bertindak dengan sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Menurut Charles O, Jones (1977), kebijakan sasaran terdiri dari komponen-komponen:

- *goal* atau tujuan yang diinginkan,
- *plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan,
- program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan,
- *decision* atau keputusan yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Kebijakan negara yang dibuat oleh pemerintah, dikategorikan dalam 3 jenis: pertama, kebijakan langsung, adalah kebijakan dimana untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pemerintah melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang terdapat dalam kebijakan, kedua, kebijakan tidak langsung, suatu kebijakan dimana untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pemerintah tidak melaksanakan sendiri kebijaksanaan tersebut, tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku/tindakan masyarakat sehingga bergerak kearah yang sesuai

dengan tujuan yang dimaksudkan, ketiga, kebijakan campuran, adalah kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau organisasi kemasyarakatan atau campuran keduanya (Dunn, 1999).

Proses selanjutnya dari suatu kebijakan adalah diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dunn (1999) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.

Dalam kenyataannya, kebijakan publik mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Hogwood dan Gunn (1986), mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan dalam dua kategori yaitu "*non implementation*" (tidak dapat diimplementasikan) dan "*unsuccessful implementation*" (implementasi yang kurang berhasil).

Secara umum tujuan implementasi adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan, publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut yang berupa hasil kebijakan. Dalam implementasi kebijakan adalah meliputi pengkajian dan analisis terhadap program-program kegiatan yang dirancang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan (Sutopo, 2001:28-29).

Rangkaian dari implementasi kebijakan adalah monitoring. Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi

keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya/*out-comes* (Hogwood dan Gunn 1989).

Tujuan monitoring menurut Dunn (1999) adalah **pertama**, *compliance*, menentukan apakah implementasi kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan, **kedua**, *auditing*, menentukan apakah sumber-sumber/ pelayanan kepada kelompok sasaran memang benar-benar sampai kepada mereka, **ketiga**, *accounting*, menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu, **keempat**, *explanation*, menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik.

Langkah terakhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktifitas-aktifitas sebelumnya, tetapi dapat juga terjadi pada seluruh aktifitas-aktifitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Dengan demikian, penilaian kebijakan mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan (Irfan islamy, 1986:112).

Analisis kebijakan publik adalah sebagai usaha untuk mengadakan informasi dalam membuat kebijakan. Oleh E.S. Quade menyatakan bahwa analisis kebijakan sebagai suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari pada pembuat kebijakan dalam membuat keputusan (Dunn, 1999:96). Sedangkan menurut Sutopo dkk, (2001:37-38) bahwa analisis kebijakan publik adalah (1) penelitian untuk mendapatkan data dan

informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, (2) mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan.

Tujuan dari analisis kebijakan adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat, disamping itu, analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Sutopo, 2001:38).

Seorang analisis dapat memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis yaitu (1) pendekatan empiris; dengan penekanan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik, (2) pendekatan evaluatif; penekanan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan, (3) pendekatan normative; ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang dan dapat menyelesaikan masalah-masalah publik (Dunn, 1999:97-98).

Dalam rangkaian analisis kebijakan publik, maka aspek-aspek yang dianalisis adalah, (1) analisis mengenai perumusan kebijakan, (2) analisis mengenai implementasi kebijakan, (3) analisis mengenai evaluasi kebijakan (Sutopo, dkk: 2001: 39-40).

2. Pengelolaan Agribisnis

Bagi Indonesia agribisnis dapat berkembang dan berprospek cerah, karena kondisi daerah yang menguntungkan, misalnya berada di garis katulistiwa yang menyebabkan adanya sinar matahari yang cukup bagi perkembangan sektor pertanian. Keadaan sarana dan prasarana wilayah, seperti daerah aliran sungai (DAS) tersedianya bendungan irigasi dan lain-lain.

Menurut Arsyad (1985), yang dimaksud dengan agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Pendapat lain bahwa agribisnis adalah serangkaian bentuk kegiatan usaha pertanian yang dimulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pengolahan hasil (panen), pengangkutan hasil produksi dan pemasaran hasil produksi pertanian.

Menurut Soekartawi (1995), produksi adalah segala hasil ciptaan benda-benda dan jasa-jasa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Kartasapoetra (1988), produksi adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna sesuatu benda dan oleh segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain lewat pertukaran.

Pengolahan hasil sangat menentukan kualitas/mutu suatu jenis barang atau produksi pertanian. Apalagi terjadi penanganan yang salah bisa berpengaruh terhadap kualitas atau mutu produksi. Pengolahan hasil juga dapat dipengaruhi oleh iklim yang tidak tentu, waktu panen yang tidak tepat, pengangkutan hasil produksi yang berakibat terhadap penurunan mutu dan kualitas barang (komoditi pertanian). Penurunan kualitas biasa terjadi disaat hasil produksi diolah, penyimpanan sebelum pemasaran (eksport) bahkan pengemasan sebelum dan sewaktu pemasaran serta penanganan yang tidak tepat. Padahal biasanya pengimpor (konsumen) menentukan sendiri kualitas dan bentuk barang/komoditi yang dibutuhkan sehingga perlu adanya penanganan yang tepat dan profesional.

Mutu dan kualitas tanaman pertanian tidak hanya ditentukan pada saat pengolahan hasil, tapi pengolahan tanah tidak kalah pentingnya dalam penentuan kualitas dan mutu tanaman yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab tanah memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan tanaman. Dimana, tanah memberikan unsur mineral baik hanya sebagai medium pertukaran maupun penyedia unsur mineral itu sendiri. Selain itu tanah sebagai tempat penyediaan air amat penting bagi aktivitas hidup tanaman dan menjadi tempat berpegang dan bertumpu bagi tanaman.

Dalam kehidupan manusia, tanaman agribisnis telah banyak mendatangkan manfaat (keuntungan) baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Jika semua yang menyangkut penanaman sudah dipelajari, maka hal yang harus diketahui adalah analisa usaha. Sehingga sebelum melakukan tindakan merencanakan terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya. Untuk itulah petani perlu mendapatkan pengetahuan untuk merencanakan dan menghitung terlebih dahulu keuntungan usahanya.

Saat ini pengusaha tanaman pangan dilakukan oleh petani tradisional atau petani sambilan, dan perusahaan agribisnis lainnya. Pengusahaannya biasanya menggunakan teknologi yang memadai dengan penanganan secara intensif untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. Upaya pengembangan dengan menggunakan teknologi yang memadai, biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan agribisnis dan petani maju dengan mengandalkan daya dukung pengusaha dan tenaga kerja yang professional. Sedangkan petani tradisional atau sambilan, biasanya menggunakan teknologi yang sederhana dengan mengandalkan daya dukung wilayah atau lahan yang

dimiliki, berdasarkan kemampuan pengetahuan dalam pengelolaan. Pengembangan potensi agribisnis tidak hanya ditentukan oleh daya dukung pengusaha, tetapi daya dukung wilayah atau lahan sangat penting. Menurut Soemarwoto (1983), bahwa daya dukung lahan tergantung pada persentase lahan yang dapat dipakai untuk pertanian dan besarnya hasil pertanian persatuan luas dan waktu. Makin besar persentase lahan yang dipakai untuk pertanian, maka makin besar daya dukung daerah itu.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Agribisnis

Pengembangan agribisnis tidak terlepas dari kegiatan usahatani (*farm management*), merupakan suatu bentuk atau cara bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan pertanian, di mana seorang petani berperan sebagai pengelola dan juru tani dalam menjalankan usahanya serta menentukan keputusan sehari-hari tentang urusan praktis. Bachtiar Rivai (1994), mendefinisikan usahatani yaitu setiap organisasi dari faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang ditujukan pada produksi di lapangan pertanian. Apabila pengorganisasian faktor produksi itu berada pada keadaan optimum, maka produktivitas dan pendapatan petani akan meningkat. Untuk mencapai pengorganisasian faktor produksi yang optimal, maka diperlukan tersediannya sarana produksi (saprodi) secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat.

Sukses usahatani tergantung pada cara pengelolaan sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan. Disamping itu juga banyak ditentukan oleh luas lahan yang dimiliki petani. Luas lahan yang dimiliki merupakan potensi yang harus dikembangkan, karena fungsi tanah sebagai salah satu faktor produksi dan modal

dalam pertanian. Menurut Mubyarto (1991), tanah sebagai faktor yang paling penting karena merupakan penentu dalam pengembangan hasil pertanian (Agribisnis).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan potensi, Mosher (1987) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah upaya pengambilan keputusan dan penentuan pilihan dari alternatif-alternatif yang ada. Margono (1984) berpendapat bahwa pengelolaan dalam suatu usaha tani digambarkan sebagai suatu kemampuan petani untuk menentukan pengorganisasian dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi yang beraneka ragam seefektif mungkin, sehingga produksi pertanian memberikan hasil yang lebih baik.

Berbicara masalah pengembangan agribisnis, tentu tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi masyarakat (petani). Selain itu sumber daya manusia merupakan unsur pendukung utama dalam proses pengembangannya. Bahkan akhir-akhir ini sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam pembangunan (agribisnis). Pengembangan sumber daya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada penduduk untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia menyangkut pemanfaatan kemampuan manusia termasuk peningkatan partisipasi manusia melalui perluasan kesempatan dalam memperoleh penghasilan dan memperbaiki taraf hidupnya (Effendi, 1993).

Untuk itu peningkatan pendapatan perlu dilakukan pada petani dan keluarganya, utamanya petani yang memiliki usaha tani kecil (Petani kecil), dimana sumberdaya yang dimilikinya masih sangat terbatas, sehingga menciptakan taraf hidup

rendah. Peningkatan pendapatan petani kecil ini perlu dilakukan agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di sekitar mereka secara optimal (Soekartawi, 1986). Lanjut Soekarwi, bahwa dari segi ekonomi ciri yang sangat penting dari petani kecil adalah terbatasnya sumberdaya dasar tempat mereka berusaha. Mereka umumnya hanya mengusai sebidang lahan kecil, kadang-kadang disertai dengan ketidakpastian dalam pengelolaan.

Dalam upaya peningkatan pendapatan, bagi petani analisa pendapatan dapat memberikan bantuan untuk mengukur apakah kegiatan usahanya pada saat ini berhasil atau tidak. Suatu usahatani dikatakan sukses kalau situasi pendapatannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : cukup untuk membayar semua pembelian sarana produksi (saprodi), cukup untuk membayar bunga modal yang ditanamkan, dan cukup untuk membayar upah tenaga kerja yang dibayar atau bentuk upah upah lainnya untuk tenaga kerja yang tidak diupah (Akib, 1989).

Dalam masyarakat terjadi pertumbuhan ekonomi, jika terdapat lebih banyak output serta adanya perubahan dalam kelembagaan, pengetahuan dan teknik-teknik produksi yang lebih banyak. Jadi masalah pertumbuhan ekonomi yang terus menerus akan mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat (Hadi Prayitno dan Licolin, 1987).

Faktor-faktor / variabel yang berkaitan terhadap kecenderungan petani untuk mengembangkan agribisnis tanaman pangan.

a. Luas Lahan Garapan

Lahan adalah sumber utama, sekaligus sebagai modal dalam pertanian. Petani dengan areal tanaman yang luas akan memperoleh pendapatan absolut yang besar sehingga berpeluang untuk menabung selanjutnya dapat melakukan investasi sebagai modal, lahan merupakan barang bernilai ekonomi yang dipakai untuk menghasilkan tambahan kekayaan atau peningkatan produksi.

Modal dalam tinjauan para ahli mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Menurut Adiwilaga (1975), modal adalah suatu faktor diantara tiga faktor dipadukan dalam proses produksi : tanah, tenaga kerja. Bila kita setuju dengan pendapat Mosher (1966), bahwa setiap petani yang menjalankan usahatani pada hakekatnya menjalankan sebuah perusahaan, maka pengertian modal dalam usahatani akan lebih kompleks lagi. Dalam kaitan ini Mosher membantah pendapat bahwa pertanian subsistem hanya sebagai *way of live*, karena bila ditinjau dari aspek produksi maka usahatani memang adalah suatu perusahaan, karena sederhana apapun petani selalu berhitung berapa hasil yang akan diperoleh dari input atau bibit yang akan ditanam pada areal yang akan digarapnya. Petani subsistem pun telah mampu berpikir dan bertindak sebagai usahawan. Pendapat Mosher ini sejalan dengan pendapat Bachtiar Rivai (1994), usaha tani adalah setiap organisasi alam, tenaga kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi lapangan pertanian. Istilah usaha tani mencakup pengertian yang lebih luas, mulai bentuk pertanian yang sederhana hingga bentuk pertanian yang moderen.

b. Umur

Umur petani dapat menentukan kecepatan dalam menyerap teknologi. Menurut Soehardjo (1988), ada suatu kecenderungan bahwa perbedaan umur akan menyebabkan terjadinya perbedaan sikap terhadap inovasi. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Akib Tuwo (2001), bahwa petani yang berumur relatif muda cenderung lebih sering menerima petunjuk yang berkaitan berumur relatif muda cenderung lebih sering menerima petunjuk yang berkaitan dengan usahataniannya. Demikian pula pendapat Soehardjo (1988), bahwa petani umur muda biasanya berpendidikan lebih tinggi sehingga lebih tanggap terhadap teknologi baru dibidang pertanian. Umur petani orbitasi jauh lebih muda dibandingkan dengan orbitasi dekat.

c. Pendidikan

Gani (1988) menyatakan, kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci dari segalanya; bila era nuklir mendatangkan bahaya baru, kemajuan teknis genetik membuka pintu kehancuran, komersialisme membawa pengusaha hal-hal yang baru, jawaban yang pasti adalah pendidikan yang lebih baik. Pendidikan mempengaruhi kesadaran, tingkat persepsi atau sikap seseorang terhadap hal-hal tertentu. Pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasan, di mana tingkat kecerdasan berpengaruh pula terhadap kreativitas dan kemampuan produktivitas.

Pendidikan petani menentukan daya tanggap terhadap informasi dari luar yang berhubungan dengan usaha pertanian. Petani berpendidikan memadai akan lebih mudah menyerap informasi melalui berbagai media seperti : Koran, brosur, majalah maupun media elektronik. Hasil penelitian di Asahan Sumatra Utara memberikan

indikasi bahwa adopsi petani kakao terhadap teknologi baru sangat lambat karena sekitar 71,5 % berpendidikan rendah. (\leq SD tahun), sehingga diperlukan pembinaan yang lebih intensif (Hadi, 1987).

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Menurut Simanjuntak (1985) pendidikan dan latihan tidak saja menambah pengetahuan akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja. Ditambahkan pula bahwa hubungan pendidikan dengan produktivitas kerja. Ditambahkan pula bahwa hubungan pendidikan dengan produktivitas kerja juga tercermin dalam tingkat penghasilan. Pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan produktivitas kerja yang tinggi sehingga memperoleh penghasilan yang tinggi pula. Pendidikan dan latihan juga dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan. Disimpulkan bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Indonesia tugas dan tantangan besar bukan saja menyangkut pendidikan formal tetapi juga latihan bagi mereka yang berpendidikan, sikap dan perilaku petani dapat diubah kearah produktivitas yang lebih tinggi. Petani yang berpendidikan lebih cepat memperoleh informasi dan mengadopsi teknologi dibandingkan dengan petani yang berpendidikan rendah, karena mereka dapat memanfaatkan media dan sarana komunikasi elektronik yang tersedia.

Adopsi teknologi merupakan keputusan petani yang ditentukan secara demokratis, yang berarti tidak dipaksakan oleh pihak lain. Dengan pendidikan yang memadai petani mudah mendapatkan informasi apakah suatu teknologi menguntungkan atau tidak. Menurut Akib Tuwo (2001) pendidikan dipercaya sebagai

faktor yang paling penting dalam menghadirkan demokratis. Akib menekankan hampir semua penelitian yang menyangkut modernisasi menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor utama, artinya tingkat pengetahuan seseorang akan meningkat dengan bertambahnya pendidikan. Dipertegas oleh Akib Tuwo (2001) pada penelitiannya dalam tingkat petani di Sulawesi Tenggara bahwa pendidikan dan daya persepsi merupakan sumber daya yang mempunyai dampak positif terhadap sikap petani sebagai dimanifestasikan oleh tindakan responsif yang pada gilirannya meningkatkan produksi pendapatan total.

d. Kontak dengan Penyuluhan

Penyuluh pertanian merupakan agen pembangunan dibidang pertanian. Penyuluh pertanian memiliki berbagai peran, antara lain : sebagai guru, penasehat, penganalisis, pembimbing petani, organisatoris, dinamisator, teknisi, dan jembatan penghubung antara lembaga penelitian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, setidak-tidaknya bila dilihat dalam jajaran aparat pemerintah yang menangani pertanian. Penyuluhan pertanian membawakan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sikap positif sehingga petani selanjutnya akan lebih giat dalam mengadopsi teknologi.

Kartosapoetra (1994), mengartikan penyuluhan pertanian sebagai suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usaha dan tingkat kehidupannya. Dalam penyuluhan ada tiga unsur yang saling berkaitan, seperti : penyuluh, pesan (materi),

dan sasaran (petani). Ketiganya saling berinteraksi dan memiliki peran serta fungsi yang berbeda.

Menurut Akib Tuwo (2001), fungsi penyuluh pertanian terdiri atas : (a) sumber informasi bagi petani tentang pembangunan baik mikro maupun makro, (b) penghubung antara petani, dengan sumber-sumber informasi yang tidak dapat tercapai sendiri oleh petani, (c) katalisator atau dinamisator didalam mengarahkan dinamika perorangan atau kelompok untuk menciptakan suasana belajar yang diinginkan, yaitu petani belajar dari petani lain selain belajar dari penyuluh, dan (d) pendidik, guru pertanian yang menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilannya dibidang pertanian kepada petani sehingga pengetahuan dan keterampilan dapat meningkat sesuai dengan kepentingan petani. Hasil penelitian Baruadi (1993), pada petani sawah dan petani tambak di Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa ada hubungan yang erat frekuensi kontak penyuluh dengan sikap petani terhadap modernisasi dan adopsi teknologi pertanian. Jadi melalui kontak dengan penyuluh banyak manfaat yang diperoleh petani, terutama dalam transfer dan mengadopsi teknologi. Respons petani terhadap pembaharuan dipengaruhi oleh pendidikan formal, luas lahan dan frekuensi kontak dengan penyuluh. Demikian pula penemuan Kartosapoetra (1988), peran petugas penyuluh sangat penting dalam menyampaikan informasi, terutama di lokasi.

e. Sifat Kosmopolitan Petani

Sifat Kosmopolitan petani berhubungan dengan daya tanggap teknologi atau perubahan-perubahan : cara usaha, lingkungan pemukiman, dan wawasan yang lebih luas. Dalam proses modernisasi hubungan kota-desa, terpaan media berisi ide-ide baru

akan diteruskan ke desa-desa melalui sumber informasi yang berasal dari luar. Salah satu cara mengukur sifat kosmopolit adalah mobilitas petani yang dicirikan oleh jumlah kunjungan keluar desa. Mobilitas akan mempercepat interaksinya dengan sumber informasi yang berasal dari luar desa petani juga akan memperoleh pengalaman baru. Atas hasil interaksinya dengan orang lain, petani mulai menambah pengetahuan, memperluas cakrawala berpikirnya. Menurut Rogers (1969), petani yang mempunyai tingkat kosmopolitan yang relatif tinggi dapat dianggap sebagai stimulator, ia memainkan peranan penting dalam menghubungkan sistem sosial dengan dunia luar desanya. Dalam perjalanan, mereka membuat perbandingan, menilai kebutuhan dan masalah sistem sosial yang dilihatnya, sehingga mereka bersikap menyukai perubahan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Abustam (1990), bahwa terdapat hubungan tingkat kesejahteraan atau mutu ke luar desa.

Gerak penduduk yang berkaitan dengan kosmopolit dapat mendorong usaha pembangunan pedesaan dan mempercepat proses penerimaan ide-ide baru. Pelaku mobilitas menjadi inovator pembangunan di desa untuk memperkenalkan dan mempraktekan teknologi baru dibidang pertanian. Mobilitas penduduk juga mengubah struktur ekonomi pasar. Menurut Abustam (1990), suatu kecenderungan kepergian orang desa ke kota telah membuat masyarakat desa berpikir luas, bersikap progresif dan terbuka terhadap perubahan. Mobilitas penduduk desa-kota menjadi salah satu kekuatan yang mengubah hidup sosial masyarakat pedesaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi mobilitas penduduk makin tinggi daya serap terhadap teknologi baru di bidang pertanian.

f. Pendapatan

Pendapatan secara umum dimaksudkan sebagai balas jasa dari sumber daya modal dan tenaga kerja petani serta keluarganya pada berbagai cabang usaha dalam waktu tertentu, biasanya dihitung dalam waktu satu tahun. Dari pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi keluarga, ditabung dan atau sebagai modal investasi guna pembangunan usaha untuk selanjutnya. Alokasi pendapatan bervariasi antara petani dengan lainnya. Susenas dan Patanas 1995 melaporkan bahwa pengeluaran perkapita dipedesaan Jawa Barat sekitar 70% dari total pengeluaran konsumsi. Sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya yaitu apabila pendapatan naik, elastisitas permintaan yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan (*income elasticity of demand*) adalah rendah untuk konsumsi bahan makanan. Sedangkan untuk pakaian, perumahan serta konsumsi barang hasil industri akan meningkat. Sifat seperti ini telah dikemukakan oleh Akib Tuwo (2001), proporsi untuk pengeluaran rumah tangga akan bertambah kecil bila pendapatan meningkat. Menurut Chenery dan Syrquin (1975), apabila pendapatan perencanaan kapita berubah dari US \$100 menjadi US \$ 1.000 maka konsumsi rumah tangga berubah dari 72,8 % menjadi 17,5 persen. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Samuelson dan Nordhaus (1995), bila pendapatan meningkat maka proporsi untuk konsumsi bahan makanan akan makin kecil terhadap total pendapatan.

g. Teknologi

Menurut Mosher (1986), Usaha tani sebagai *way of life* yang mempunyai dimensi keterkaitan dengan semua aspek kehidupan petani. Kehidupan petani tidak

dapat dipisahkan dengan tanaman dan lahan usaha taninya sebagai suatu kesatuan yang disebutnya sebagai tritunggal usaha tani.

Beranjak dari pertanian tradisonal menuju pertanian modern yang berkelanjutan diperlukan transformasi melalui beberapa pendekatan, antara lain : pendekatan sistem produksi dan pendekatan perilaku petani terhadap adopsi teknologi. Penerapan teknologi baru tidak dapat dipisahkan dengan pola kehidupan petani dalam usaha meningkatkan hasil pertanian.

4. Hambatan dan Peluang pengembangan Agribisnis

Salah satu indikator kehidupan sosial ekonomi pertanian adalah dilihat dari adanya peluang kegiatan usaha, peluang kelayakan usaha, dan peningkatan pendapatan. Kegiatan usaha, dapat berjalan dengan baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan pertanian, adanya modal usaha dan tenaga kerja yang memadai. Tetapi sangat ditentukan pula oleh aspek-aspek kemampuan dan merupakan ciri khas dari pada pertanian yang tangguh, yaitu : (1) mampu memanfaatkan segala sumberdaya secara optimal; (2) mampu menghadapi segala hambatan dan tantangan yang dihadapi; (3) mampu menyesuaikan diri dalam pola dan struktur produksi terhadap perubahan permintaan masyarakat serta perubahan teknologi, dan (4) mampu berperan positif dalam pembangunan wilayah, baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan usaha dalam penyebaran tenaga kerja (Kaslan, 1992).

Faktor produksi dan pengolahan hasil pertanian bukan satu-satunya faktor penentu dalam kelayakan usaha agribisnis. Faktor lain yang dapat menentukan layak

tidaknya usaha dibidang agribisnis adalah dilihat dari efisiensi pemasaran dan sistem pemasaran yang efisien. Ada beberapa faktor yang dipakai sebagai ukuran efisiensi pemasaran, yaitu keuntungan pemasaran, harga yang diterima, tersediannya fasilitas fisik pemasaran dan kompetisi pasar. Sistem pemasaran dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat, yaitu mampu menyampaikan barang dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya yang semurah-murahnya dan mampu memberikan pembagian harga yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang tersebut (Mubyarto, 1986).

Masalah efisiensi inilah yang menyebabkan pembahasan terhadap agribisnis tetap menarik perhatian. Masalahnya bukan hanya terletak pada aspek produksi, pengolahan hasil dan pemasaran saja, tetapi juga pengaruh lain. Dengan adanya persaingan yang ketat tentang pemasaran hasil pertanian di pasar dunia (*World Market*), semakin menuntut peranan kualitas produksi, dan kemampuan menerobos pasar dunia menjadi semakin penting, kemampuan mengantisipasi pasar (*Market Inteligent*), juga menjadi amat penting. Untuk mewujudkan itu, maka bentuk usaha yang skala kecil perlu bergabung dalam skala usaha yang lebih besar agar mampu bersaing dipasaran global dan internasional. Untuk menjaga kelangsungan kemampuan menerobos pasar ini, maka kontinuitas bahan baku pertanian perlu dijamin, bukan saja pada jumlah bahan baku yang diperlukan, tetapi juga kualitas dan kontinuitasnya.

Peluang pengembangan agribisnis di Indonesia memang memiliki potensi yang sangat besar, hanya saja kemampuan sumberdaya petani yang masih sangat terbatas.

Pada umumnya petani di Indonesia masih bersifat tradisional atau petani subsistem yang masih sulit dalam menerima perubahan dan mengadopsi teknologi baru. Petani subsistem biasanya mengutamakan kepuasan. Petani yang mudah menerima perubahan dan mengadopsi teknologi baru kedalam kehidupannya, biasanya disebut petani maju atau petani modern. Petani modern biasanya mengutamakan keuntungan (*benefit*) (Soekartawi, 1991).

Besarnya peluang-peluang dalam pengembangan agribisnis di Indonesia tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan dalam pengembangannya. Secara umum hambatan-hambatan dalam pengembangan agribisnis di Indonesia adalah sebagai berikut ; (1). Pola produksi pada beberapa komoditi pertanian tertentu terletak di lokasi yang terpencar-pencar, sehingga menyulitkan pembinaan dan tercapainya efisiensi pada skala usaha tertentu; (2). Sarana dan prasarana belum memadai, sehingga menyulitkan untuk mencapai efisiensi usaha pertanian; (3). Akibat dari kurang memadainya sarana dan prasarana tersebut, maka biaya transportasi menjadi lebih tinggi; (4). Sering dijumpai adanya pemusatan agroindustri yang terpusat di kota-kota besar, sehingga nilai bahan baku pertanian menjadi lebih mahal untuk mencapai lokasi agribisnis tersebut; (5). Sistem kelembagaan, terutama dipedesaan terasa masih lemah, sehingga komoditi seperti ini kurang mendukung berkembangnya kegiatan agribisnis.

Telah diuraikan di atas, bahwa perlunya analisa pendapatan bagi petani dalam mengukur berhasil tidaknya kegiatan usahatani yang dilakukannya. Namun sebelum melakukan analisa pendapatan petani terlebih dahulu melihat ada tidaknya peluang peningkatan pendapatan sebagai skala prioritas dalam pengembangan kegiatan usaha

agribisnis. Pendapatan dapat dikatakan meningkat, apabila terdapat selisih antara penerimaan dengan seluruh biaya (cost) produksi yang dikeluarkan, Soekartawi (1991) lanjut Soekartawi, menyatakan bahwa pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh dari pengeluaran faktor produksi, tenaga kerja, pengelolaan dan modal sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan kedalam usahatani.

Besarnya nilai penerimaan dan kecilnya biaya produksi dapat mengindikasikan adanya peluang pendapatan. Semakin besar nilai penerimaan, maka semakin besar pula peluang pendapatan. Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pendapat lain, bahwa penerimaan adalah pemasukan sumber dana yang berasal dari penjualan barang atau jasa sebagai suatu usaha untuk memperoleh laba/keuntungan (Soemita, 1986).

5. Konsep Peningkatan Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan sub sektor dari sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi juga sub sektor lainnya seperti perkebunan, hortikultura, dan peternakan . Dan berbicara mengenai konsep tanaman pangan, maka tak lain adalah suatu usaha secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dalam arti luas baik dari segi produksi, pemasaran dan aktifitas penunjang lainnya.

Mengacu dari konsep dasar mengenai peningkatan dari nilai tambah ini , maka usaha peningkatan tanaman pangan itu sendiri dapat menggunakan konsep yang di kembangkan dalam dunia agribisnis yang pada dasarnya berangkat dari perkembangan kondisi pertanian tradisional atau kesuatu sistem pertanian yang bersifat komersial

atau berorientasi pada keuntungan pihak-pihak yang mengusahakannya baik pada sub sistem pengolahannya.

Dalam dunia agribisnis, yang terjadi fokus perhatiannya adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada bidang pertanian atau bidang yang berkaitan dengan pertanian. Dengan demikian kegiatan agribisnis merupakan sistem yang terintegral secara vertikal, dan sebagai suatu usaha yang berorientasi komersial atau pasar, bisa saja hanya mengerjakan salah satu dari komponen atau segmen dalam sistem kegiatan agribisnis.

Peran masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan tersebut adalah seluruh komponen masyarakat petani, peternak, nelayan yang umumnya berskala kecil dan para pengusaha agribisnis pangan. Peran pemerintah dalam hal ini adalah fasilitas untuk menciptakan kondisi kondusif agar lingkungan usaha mendukung tumbuh kembangnya agribisnis dan industri pangan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu mengenali permasalahan, potensi, peluang, dan cara pemanfaatannya sehingga mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga secara berkelanjutan.

Menurut Saragih (2004) bahwa : orientasi pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari perubahan lingkungan strategi global. Perubahan lingkungan strategis global telah mengarah kepada semakin terbukannya dan menyatunya pasar domestik dengan pasar internasional, diterapkannya mekanisme pasar. Keterbukaan ekonomi dan perdagangan global tersebut menuntut kita untuk memperhatikan perkembangan perdagangan sebagai bagian pengolahan kebijakan pangan nasional,

Indonesia mempunyai keunggulan komperatif sebagai negara agraris dan maritim, yang merupakan potensi sumber pangan yang sangat besar, keunggulan komperatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing dengan begitu perekonomian yang dikembangkan di Indonesia memiliki landasan yang kuat pada sumber daya domestik berkelanjutan memiliki kemampuan bersaing serta berdaya guna bagi seluruh rakyat.

Mengacu pada keterbukaan ekonomi dan perdagangan global, Arsyad dalam Sukartawi (2001), mendefinisikan agribisnis sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud dengan pertanian luas adalah kegiatan usaha yang umumnya kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang di tunjang oleh kegiatan pertanian.

Damiri dalam Masyuri (1994) mengemukakan bahwa : sebagai suatu sistem agribisnis terdiri dari sub sistem sebagai berikut :

1. Sub sistem input produksi pertanian yang meliputi usaha pengadaan pupuk, pestisida, bibit, dan alat pertanian.
2. Sub sistem produksi pertanian yang meliputi kegiatan pertanian tanaman panganan.
3. Sub sistem pengolahan hasil-hasil pertanian yang meliputi penanganan pasca panen ditingkat petani sampai pengolahan hasil pertanian.

4. Sub sistem pemasaran yang meliputi hasil-hasil pertanian dan hasil olahannya termasuk pemasaran pupuk dan lain-lain.
5. Sub sistem penunjang yang meliputi kegiatan konsultasi pelatihan dan penyuluhan, kredit usaha, transportasi dan pengembangan riset.

Dari pengertian dan ulasan tersebut, maka dapat di kemukakan bahwa konsep peningkatan pertanian tanaman pangan adalah identik dengan konsep agribisnis dipandang dari pendekatan proses, pelaku (*stake-holder*) maupun dari sudut pandang komoditi atau bahan baku dan peralatan penunjang yang ada di sekitar lingkungan sektor pertanian tanaman pangan.

Jika diklasifikasikan, maka yang meliputi usaha peningkatan tanaman pangan adalah sebagai berikut ;

- 1) Sub – sistem input yang meliputi pengadaan komoditi berikut ;
 - Benih atau bibit bermutu
 - Pupuk organik maupun anorganik
 - Pestisida
 - Peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian
- 2) Sub – sistem produksi pertanian yang meliputi komoditi sebagai berikut ;
 - Padi
 - Jagung
 - Kedelai
 - Kacang tanah
 - Ubi kayu

- Kacang hijau
 - Ubi jalar
 - Sorgum
- 3) Sub-sistem pengolahan yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
- Pembuatan tepung singkong
 - Pembuatan tahu dan tempe
 - Pembuatan tape
- 4) Sub-sistem pemasaran komoditi yang meliputi kegiatan berikut :
- Pembelian oleh pedagang pengumpul
 - Pembelian oleh pedagang pengencer
 - Pembelian oleh pedagang besar
- 5) Sub-sistem jasa penunjang yang meliputi kegiatan berikut :
- Penyuluhan
 - Kredit usaha tani
 - Transportasi

Komoditi atau hasil pertanian tanaman pangan adalah komoditi pertanian sebagai penghasil karbohidrat sumber makanan pokok seperti padi, jagung, ubi kayu, dan palawija (kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan dibedakan dengan menghasilkan buah, sayuran, bunga hias, rempah-rempah dan bahan baku jamu. Hortikultura dengan penghasil tanaman pangan karbohidrat memiliki perbedaan pada cara budidaya, lokasi olahan, sifat olahan dan besarnya masukan modal yang

diperlukan per satuan luas lahan, serta besarnya tenaga kerja yang diperlukan per satuan luas lahan.

6. Wawasan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Sebenarnya sumberdaya dasar sistem pertanian (secara luas) pada umumnya dicirikan oleh sifat dapat pulih kembali (*renewable*), sehingga andaikata dalam pengelolaannya terutama yang berkaitan dengan sistem pemanen dan penanamannya dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan daya regenerasinya, akan mempunyai peluang besar yang mengarah kepada sistem pertanian yang berkelanjutan. Karenanya jika aktifitas pertanian diupayakan secara hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam sistem pengelolaannya, sumberdaya tersebut dapat diusahakan untuk mencapai tingkat keberlanjutan (*sustainability*) seperti yang diinginkan. Sistem pertanian juga secara alamiah (fisik-biologi) menunjukkan akan sifat keterkaitan antara sub-sistem yang membentuknya secara keseluruhan (mulai dari bagian hulu, tengah, hilir sampai kelaut), sehingga di dalam sistem pengelolaannya memerlukan pertimbangan keterkaitan satu sama lain antara subsistem-subsistem yang bersangkutan secara terintegrasi. Kebutuhan akan pertimbangan pengelolaan secara keterpaduan tersebut yang diarahkan kepada tujuan-tujuan yang bersifat serbaguna (*multiple use of resources*) pada sistem-sistem pertanian sangat diperlukan, karena sifat sumberdaya alam di lokasi yang beriklim tropis dan negara kepulauan seperti di Indonesia, pada umumnya bersifat rawan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang terintegrasi dan serbaguna diharapkan akan dapat mengatasi kerawanan tersebut dan sekaligus dapat menjamin sifat keberlanjutan sistem pertanian yang bersangkutan.

Dalam praktek budidaya di bidang pertanian secara luas untuk mencapai tingkatan keberlanjutan seperti diatas, sebenarnya telah lama dilaksanakan di Indonesia dengan berbagai kearifan yang rasional yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Pembangunan pematang-pematang pada lahan persawahan dan sistem teras di lahan kering sebenarnya merupakan pencerminan dari usaha untuk melakukan cara konservasi lahan yang paling baik. Demikian juga tidak sedikit tatanan kelembagaan yang dikaitkan dengan adat istiadat setempat yang berkaitan dengan pemungutan hasil, telah mampu dalam mengatur pemanenan sumber daya alam liar diberbagai daerah-daerah. Pengaturan sistem pengelolaan tersebut yang telah lama dikenal dan telah melembaga serta di taati oleh masyarakatnya. Kelembagaan seperti yang di sebut SASI yang terdapat di wilayah perairan Indonesia Bagian Timur (IBT) dengan segala pengaturan hak-hak dan kewajibannya, umpamanya telah lama dapat mengatur penentuan siapa yang dapat melakukan dan penentuan banyaknya panen dengan pengaturan izin menurut musim-musim tertentu untuk pemanen sumberdaya perairan disana. Kelembagaan ini telah diatur oleh adat setempat yang pada dasarnya mencoba menyesuaikan banyaknya pengambilan panen dengan memperhitungkan kemampuan daya regenerasi sumberdaya yang bersangkutan. Didalam sistem kelembagaan adat ini terkandung sistem insentif ekonomi yang rasional, yang menyangkut pengaturan distribusi manfaat serta maslahat (bagi yang mentaati dan kemudahan (berupa sanksi bagi yang melanggarnya) telah lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Karenanya aturan adat tersebut dan pengalaman jangka waktu yang lama secara umum telah memberi manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, kelembagaan tersebut

telah mencapai keseimbangan jangka panjang, sehingga di taati dan dihormati oleh seluruh warga masyarakatnya.

Negara Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan, ditinjau dari kestabilan ekosistem secara keseluruhan relatif mempunyai kerawanan yang lebih besar jika dibandingkan dengan negara yang terletak disalah satu benua, kerawanan tersebut baik terletak dari ukuran pulau yang relatif kecil, terutama untuk pulau-pulau di wilayah Indonesia Bagian Timur yang secara geografis terpisah dari landasan kontinen eurasia, ditambah bentuk fisiografisnya kurang menguntungkan. Pulau kecil-kecil seperti yang tersebar di kepulauan Maluku merupakan pulau-pulau yang terlepas dari masa benua yang mempunyai proses evolusi secara endemik dan mempunyai keragaman jenis-jenis biologi (*biodiversity*) yang lebih miskin, sehingga apabila didalam pulau yang bersangkutan terjadi perubahan besar (*exogenous shock*) sebagai akibat dampak suatu aktifitas pembangunan pertanian yang tidak dilakukan secara cermat, maka cenderung tindakan tersebut akan mengarah kepada kerusakan yang mungkin bersifat tidak pulih kembali (*irreversible*).

Perubahan-perubahan tersebut telah memperlihatkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan terhadap keadaan sumberdaya alam yang menjadi unsur-unsur pendukung kehidupan semua makhluk hidup yang saling berkaitan dengan kepentingan manusia sekarang dan generasi sekarang, karena jumlahnya semakin menyusut, juga kualitasnya menjadi semakin menurun. Oleh karena itu, terjadilah perubahan-perubahan mendasar yang menjadi faktor pendorong bagi para pemikir di bidang ekonomi dan pertanian untuk mencari suatu paradigma sistem pertanian (model dasar

kerangka berfikir pengembangan pertanian) yang baru, yang dapat lebih memahami persoalan yang dihadapi, agar dapat menjurus kepada kemampuan pemecahan persoalan ke arah yang lebih baik. Karena cara-cara berfikir pakar ekonomi dan pertanian menyadarkan diri pada sistem ekonomi pasar

Cara tradisional selama ini lebih banyak dilakukan karena adanya cara pandang yang sempit dan terlalu menyederhanakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Cara berpikir demikian tidak dapat digunakan secara bermanfaat dalam menghadapi perkembangan kehidupan perekonomian pertanian secara luas yang semakin kompleks dimasa sekarang dan yang akan datang.

Demikian bahwa keadaan sumberdaya alam yang menjadi unsur-unsur lingkungan hidup tersebut sekarang telah dipandang sangat berkaitan erat dengan upaya-upaya yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan dalam pembangunan karena pada dasarnya menentukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Jika dalam pembangunan terlalu menekankan kepada upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa/kurang memperhitungkan dampaknya terhadap tingkat dan kualitas sumber daya lingkungan hidup, maka hal tersebut dapat merusak tujuan pembangunan itu sendiri terutama dalam jangka panjang, karena ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik jika dibiarkan akan terancam.

Metode pemikiran baru mengenai konsepsi pembangunan pertanian yang berkelanjutan karena masih tetap menyadari tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi. Tetapi pendapat ini sangat berlainan dengan pemahaman konsep pembangunan yang sebelumnya yang menggunakan pemikiran ekonomi secara sempit.

Pemikiran baru ini terutama menaruh perhatian besar yang menyangkut tentang pentingnya kesadaran terhadap perlunya pemeliharaan sumber daya alam yang jumlah dan semakin menyusut persediaanya. Oleh karena itu, di dalam cara berpikir juga ini memerlukan dibinanya sikap yang dapat menghargai pengalaman dan kearifan yang diperoleh dari nenek moyang kita dalam melestarikan sumberdaya alam, sehingga cara eksploitasinya perlu menerapkan teknologi yang bukan hanya menguntungkan secara ekonomi individual, tetapi juga harus meningkat pemanfaatannya secara luas dan meningkat akan keterbatasan daya regenerasinya serta dampaknya kepada masyarakat.

Dalam konteks regional, kerangka berpikir pembangunan pertanian berkelanjutan memerlukan adanya pandangan terhadap perlunya menciptakan sistem pengelolaan secara regionalisasi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan pada tingkat masyarakat.

7. Peningkatan Sektor Pertanian Tanaman Pangan.

Ada empat kegiatan pokok yang di sebutkan sebagai wacana analisa peningkatan sektor pertanian tanaman pangan dalam rangka otonomi daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Otonomi daerah yang merupakan implementasi dari konsep desentralisasi kewenangan pusat ke daerah, akan memberikan dampak yang luas dari segi perekonomian daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas maka diharapkan akan terjadi penyebaran kegiatan perekonomian yang lebih merata di seluruh daerah dan tumbuhnya potensi ekonomi baru di daerah. Berbagai peraturan perundangan dan kebijakan operasional yang berkenan dengan otonomi

daerah yang merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendistribusikan pembangunan dan kewenangan pengelolaan. Khusus untuk peningkatan tanaman pangan, maka dibutuhkan adanya dukungan peraturan perundangan yang mengatur kebijakan peningkatan tanaman pangan sehingga sektor ini mampu mengerakan perekonomian daerah secara positif dan signifikan.

2. Di samping itu, konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah ikatan tanggung jawab kepada daerah secara lebih profesional dalam peningkatan peran masyarakat untuk bersama untuk mampu menggali semua potensi sumberdaya yang tersedia di daerahnya semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat dengan demikian pada akhirnya pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat akan lebih mampu membiayai jalanya roda pemerintah daerah serta pembangunan sarana dan prasarana publik semaksimal mungkin di daerah yang bersangkutan. Konsekuensi dari wacana ini adalah tanggung jawab semua pihak (*stakeholder*) yang ada di daerah untuk bersama-sama menggali potensi pertanian tanaman pangan menjadi sektor yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah, peningkatan pendapatan masyarakat dan ketersediaan bahan pangan bagi wilayah lokal dan wilayah sekitarnya.

Dengan adanya otonomi dalam arti luas, maka diharapkan pemerintah daerah menjadi regulator yang adil, fasilitator dan motifator yang handal, sehingga tercipta sinergi yang lebih besar antara pemerintah daerah dan masyarakat atau antara komponen masyarakat untuk berfungsi sebagai "*agen of development*" yang tangguh bagi penyelenggaraan pembangunan. Sektor pertanian tanaman pangan akan berhasil

dikelola jika terdapat sinergi yang kuat di antara para pelaku (*stakeholder*) dengan menampilkan keunggulan masing-masing dalam berkolaborasi mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan.

Melalui otonomi daerah maka diharapkan secara nasional maupun regional, pemerintah dan masyarakat dan khususnya pihak swasta mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya yang menjadi suatu usaha yang mandiri dan unggul, sehingga akan mampu dan siap untuk berkompetisi di era pasar bebas dan pada lingkungan globalisasi. Orientasi pasar global perlu dipikirkan melalui peningkatan produk pertanian tanaman pangan agar mampu bersaing dengan produk pertanian yang datang dari luar, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang diproduksi.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian pengertian dan konsep peningkatan tanaman pangan bahwa ada lima subsistem yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain sebagai satu sistem yaitu sistem input produksi, subsistem produksi, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang. masing-masing subsistem ini terdapat para pelaku. *Stakeholder* yang berdiri sendiri maupun yang memiliki kegiatan pada beberapa subsistem yang ada.

Identifikasi bagi para pelaku (*stakeholder*) pada kegiatan peningkatan tanaman pangan secara keseluruhan adalah sebagai berikut ;

1. Untuk subsistem input produksi meliputi pabrik dan penyalur pupuk, penyalur pestisida, pembuat dan penyalur bibit, serta dan penyalur alat-alat mesin pertanian.
2. Untuk subsistem produksi meliputi para petani atau pengusaha agribisnis skala besar.

3. Untuk subsistem pengolahan meliputi para petani dan para pebisnis atau industriawan yang mengolah hasil pertanian tanaman pangan ini menjadi bahan makanan siap saji.
4. Untuk subsistem pemasaran meliputi baik untuk subsistem input produksi yaitu (distributor) pupuk, pestisida dan alat – alat mesin pertanian, maupun subsistem produksi terhadap hasil–hasil pertanian yang umumnya dilakukan oleh para petani, koperasi atau distributor penampung hasil pertanian.
5. Untuk subsistem penunjang meliputi para penyuluh dan dinas pertanian tanaman pangan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menyalurkan kredit usaha tani, para pemilik truk angkutan hasil pertanian, dan para periset dari laboratorium atau badan riset pertanian dari perguruan tinggi.

Untuk tujuan penelitian ini maka hanya para pelaku (*stakeholder*) yang berada di Kabupaten Buton atau para pelaku yang memiliki kaitan langsung atau memiliki relevansi kaitan langsung yang akan diikut sertakan sebagai unit analisis atau nara sumber dalam penelitian ini dalam rangka menemukan strategi yang tepat dan handal untuk meningkatkan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton. Jadi para pelaku atau *stakeholder* yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah para petani yang berada pada hampir semua subsistem yang ada, anggota organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, pemilik toko, pengurus koperasi, dan para pebisnis hasil pertanian tanaman pangan dan penggunaanya disesuaikan dengan tujuan analisa dan kelengkapan data yang dimiliki.

Untuk menemukan strategi yang tepat dan handal, maka akan dilakukan analisa dengan menggunakan teknik dalam manajemen strategik dengan mengelaborasi visi dan misi yang dimiliki daerah pemerintah Kabupaten Buton dalam upaya peningkatan sektor pertanian tanaman pangan. Dan juga menganalisis faktor-faktor yang relevan sebagai faktor eksternal dan internal dalam suatu sistem lingkungan yang saling pengaruh mempengaruhi terhadap kinerja peningkatan pertanian tanaman pangan Kabupaten Buton. Temuan-temuan yang akan diperoleh berada dalam suatu kerangka analisa dengan menggunakan metode manajemen strategik terutama teknik analisa data dengan menggunakan analisa matriks SWOT (*strenght, weakness, opportunity, dan threat*).

8. Pengertian dan Penerapan Manajemen Strategik

Berbicara mengenai strategi, maka akan terbayang dalam pemikiran kita adalah upaya untuk memenangkan suatu pertempuran atau peperangan yang dihadapi. Bagaimana menggunakan dan mengalokasikan kekuatan yang dimiliki secara tepat dan dalam waktu yang tepat pula untuk memukul mundur lawan dan berupaya memenangkan peperangan secara keseluruhan.

Konsep strategi ini pula berkembang dalam kanca persaingan bisnis yang dilakukan untuk memenangkan dan menguasai pasar yang ada. Bagaimana membuat dan menciptakan produk suatu unggulan, sehingga mampu menguasai pasar secara baik dan berkesinambungan. Hal ini dapat dicapai, hanya apabila suatu perusahaan atau organisasi secara tepat memiliki strategi, baik pada proses produksi, pengemasan, promosi, distribusi, dan pelayanan yang baik, bagi para pelangganya.

Strategi juga dikenal dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang biasanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam satu program pembangunan, sebagai akibat keterbatasan sumberdaya yang ada, dengan cara mengoptimalkan dan mengalokasikan secara tepat sumber daya tersebut. Kata strategis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*strategos*", yaitu dari akar kata "*stratos*" yang berarti militer, dan akar kata "*manage*" yang artinya memimpin. Jadi pengertian strategi pada konteks awal, dapat diartikan sebagai "*generalship*" atau sesuatu yang dikerjakan oleh para Jenderal atau perancang militer dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan. Dalam perkembangan selanjutnya terminologi dan konsep strategi digunakan secara luas, baik di kalangan bisnis maupun di kalangan birokrasi pemerintah, termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam melaksanakan program atau kegiatan pembangunan yang terencana dengan baik.

Penerapan strategi yang diinginkan oleh kalangan bisnis maupun kalangan penyelenggara pembangunan (pemerintah maupun LSM), pada perkembangannya dikemas dalam suatu metode yang saat ini dikenal luas yaitu manajemen strategis. Pengintegrasian terminologi strategi dan manajemen, sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari upaya untuk mencapai keberhasilan suatu program dengan menerapkan fungsi-fungsi secara utuh, baik perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan (kepemimpinan, pengawasan dan pengevaluasian kembali).

Menurut Salusu (2008), strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Dalam dunia bisnis strategi sering digunakan untuk menunjuk pada tindakan khusus yang dipakai oleh seorang manajer guna mengimbangi tindakan potensial yang diperkirakan akan muncul dari pesaing-pesaingnya.

Bryson (2003), strategi sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi melakukannya.

Sementara itu, Qudrat (2007) menjelaskan tahap-tahap manajemen strategik yaitu:

- 1) Proses manajemen strategik terdiri dari tiga tahapan. Formulasi strategi meliputi mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman dari luar organisasi, menentukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari dalam organisasi, menetapkan tujuan-tujuan (sasaran-sasaran) jangka panjang, menghasilkan strategi-strategi alternatif, dan memilih strategi-strategi tertentu untuk dijalankan.
- 2) Penerapan strategi mengarah ke organisasi supaya menetapkan sasaran-sasaran per tahun, menetapkan kebijakan-kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan, pengimplementasian strategi mencakup membangun suatu budaya yang mendukung strategi, menciptakan sebuah struktur organisasi yang efektif, mengarahkan kembali usaha-usaha pemasaran, menyiapkan anggaran,

mengembangkan dan menggunakan sistem informasi dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

- 3) Penilaian strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategik. Para manajer berusaha keras mengetahui kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, penilaian strategi merupakan alat utama untuk memperoleh informasi ini.

Menurut Nawawi (2000 : 147-148) bahwa : menginventarisir 4 (empat) dari manajemen strategik sebagai berikut;

1. Manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan atau pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan dan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan implementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya.
2. Manajemen strategik adalah usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengespoloitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukannya.
3. Manajamen strategik adalah suatu keputusan dan tindakan yang mengarah pada suatu pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang aktif untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
4. Manajemen strategik adalah perencanaan berskala besar (perencanaan strategik) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi) dan di tetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil).

Penerapan manajemen strategik pada level organisasi mikro, pada dasarnya dapat juga digunakan untuk analisa mencari strategi yang tepat dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Teknik analisa dalam manajemen strategik amat relevan dipakai untuk menganalisis prospek dan performance pengembangan sektor pertanian tanaman pangan Kabupaten Buton. Melalui komponen analisa yang dipunyai oleh manajemen strategik, maka akan diperoleh visi dan misi yang tepat untuk Kabupaten Buton dalam usaha mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan di seluruh wilayah Kabupaten Buton yang berpotensi.

Strategi pengembangan ini diperoleh melalui analisa faktor lingkungan internal dan eksternal untuk menemukan dan mengidentifikasi isu atau faktor strategis sebagai temuan yang dapat dipergunakan dalam menentukan masa depan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton.

Konsep atau kerangka berpikir manajemen strategik berupaya mencari jalan keluar bagi institusi atau organisasi untuk beradaptasi kembali terhadap perubahan dan tantangan lingkungan melalui pencarian isu atau faktor strategis dengan menggunakan teknik-teknik manajemen, agar kemajuan dapat dipertahankan dengan kinerja yang semakin optimal.

Siagian (2004), teori manajemen strategik mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh pada suatu organisasi dapat dikategorikan pada dua kategori utama, yaitu faktor-faktor eksternal yang jauh atau lingkungan umum meliputi faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan industri dan faktor-faktor

eksternal yang dekat atau lingkungan industri meliputi pesaing, penyanggah dana, pasaran tenaga kerja, pemasok, dan pelanggan.

Nawawi (2001 : 183 -186) berpendapat bahwa institusi atau organisasi akan menjadi dinamis dalam berproses atau beraktifitas karena:

1. Mampu menjadi pengendali dalam mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki secara terpadu dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen secara efisien dan efektif.
2. Penerapan manajemen strategi dapat dilakukan dengan memilih dan menetapkan strategi sebagai pendekatan yang logis, rasional, dan sistematis sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaannya.
3. Berfungsi sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, prakarsa, inovasi dan informasi baru, serta cara merespon perubahan lingkungan yang ada.
4. Mampu mendorong semua pihak (stakeholder) yang ada untuk ikut serta dan terlibat sesuai dengan wewenang dan posisi yang dimilikinya.
5. Menuntut semua pihak yang ada atau terlibat untuk ikut berpartisipasi secara penuh terhadap keberhasilan yang ingin dicapai.

Jadi manajemen strategis memberikan gambaran kepada pengambil keputusan mengenai bagaimana suatu institusi dapat digerakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diembannya dengan mengelolah secara efektif faktor-faktor strategis yang ada.

Untuk menerapkan teknik manajemen strategik secara baik dan berhasil menurut Bryson (2003), harus dipertimbangkan 8 (delapan) langkah pokok yaitu:

1. Kesepakatan awal terhadap suatu proses manajemen strategik. Untuk itu perlu dilakukan negosiasi dengan para pembuat keputusan (*decision maker*) agar diperoleh dukungan dan komitmen dalam implementasinya kemudian.
2. Mengidentifikasi yang ada, baik yang bersifat formal maupun informal secara jelas dan transparan, karena mandat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan suatu institusi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai institusi karena posisinya penting sebagai tujuan bagi kebutuhan sosial atau politik yang akan diraih.
4. Menilai lingkungan eksternal yang menyangkut peluang dan ancaman yang ada. Faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan eksternal ini adalah meliputi politik, ekonomi, sosial dan teknologi.
5. Menilai lingkungan internal yang berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki maupun kelemahan yang ada. Dalam hal ini institusi dapat memonitori sebagai sumber daya sebagai input, strategis saat ini sebagai konversi, dan kinerja yang diperoleh sebagai output
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, antara lain yang menyangkut tujuan, cara, falsafah, lokasi, ketepatan waktu, pihak-pihak (*stakeholder*) yang mendapat keuntungan atau mengalami kerugian jika strategi baru diimplementasikan.
7. Merumuskan strategi baru dan tepat untuk mengelola isu-isu strategi yang ada dan muncul kemudian .
8. Membangun suatu visi institusi yang tepat untuk masa yang akan datang

9. Visi dan Misi

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi baru secara tepat adalah sebagai berikut :

a. Visi

Suatu keadaan atau kondisi masa depan yang diinginkan diwujudkan yang berfungsi sebagai penggalang harapan dan semangat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dimasa yang akan datang. Gambaran ke depan ini harus mampu mengarahkan dan menjadi inspirasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk berupaya mewujudkan keinginan masa depan itu.

Jadi visi merupakan pandangan dan cita-cita yang ingin diraih untuk waktu yang akan datang dan berfungsi sebagai pedoman bagi arah pengembangan suatu daerah di masa mendatang.

b. Misi

Misi pada hakekatnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi. Tujuan organisasi menjadi pedoman apa yang harus dilakukan suatu institusi sebagai suatu prioritas dan bagaimana menggunakan sumber daya secara tepat. Suatu misi mengandung serangkaian tindakan yang lebih nyata atau suatu yang harus diemban untuk pencapaian visi.

10. Analisa Lingkungan Strategi

a. Lingkungan internal

Analisa lingkungan internal adalah analisa yang dilakukan pada level internal organisasi dalam rangka menilai kekuatan (*strength*) dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Dengan demikian proses analisa lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting dan harus dilakukan, karena dengan analisa lingkungan internal maka akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada dan selanjutnya berguna untuk mengetahui isu-isu strategi. Adapun yang tercakup dalam lingkungan internal adalah faktor sumberdaya, strategi yang digunakan dan faktor kinerjanya.

b. Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang mengekspresikan diri sebagai kekuatan atau kelemahan yang berada di luar organisasi, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu organisasi secara paksa dan pada akhirnya memberikan dampak pengaruh timbal balik antara organisasi dan lingkungan tersebut.

Pada hakekatnya lingkungan eksternal mengandung dua aspek yaitu peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal suatu institusi atau organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencapaian misi yang disepakati. Pengaruhnya yang cukup kuat ini menyebabkan perlunya perhatian yang serius terhadap dimensi yang terkandung didalamnya, meskipun berada diluar organisasi. Adapun faktor-faktor yang tercakup dalam faktor eksternal tersebut adalah ; aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.

11. Identifikasi Isu Strategi

Isu strategi berdasarkan pengertiannya adalah konflik satu jenis atau lainnya. Konflik bisa terjadi pada arah tujuan, cara, prinsip, lokasi, waktu dan kelompok-kelompok yang memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian akibat dampak atau hasil dari pencacah isu tersebut. Untuk memunculkan dan memecahkan isu secara efektif, institusi atau organisasi harus dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan akan terjadinya konflik yang biasanya tidak dapat dihindari.

Untuk menyeleksi dan memilih isu strategik secara tepat, maka dapat digunakan 5 teknik analisa (Nawawi, H. Hadari : 175 – 176) sebagai berikut :

1. Teknik matriks faktor internal dan eksternal (*The internal And External Faktor Matriks*), yang dilakukan dengan analisa dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta mengkaji peluang dan hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan suatu misi, baik yang bersumber dari faktor dalam maupun dari luar institusi.
2. Teknik matriks profil kompetitif (*The Competitive Profile Matriks*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan institusi yang sejenis, agar dapat diadaptasi atau digunakan strateginya.
3. Teknik matriks memperkuat dan megevaluasi posisi (*The Strength Position And Evaluation Matriks*), yang dilakukan dengan mencocokkan kemampuan sumber daya internal yang dimiliki untuk memperkuat posisi dengan peluang ada dan mengatasi atau menghindari resiko faktor eksternal.

4. Teknik matriks dari kelompok konsultan Boston (*The Boston Consulting Group Matriks*) dilakukan dengan menetapkan strategi yang berbeda-beda untuk setiap biro atau bidang sebagai unit atau satuan kerja.
5. Teknik matriks strategi induk (*The Grand Strategi Matriks*) yang dilakukan dengan menetapkan posisi yang kompetitif diukur dari tingkat keunggulan atau keberhasilan maksimum yang dapat dicapai.

B. Kerangka Berpikir

Kekuatan dari aspek sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton adalah luas lahan yang memadai, strategi dinas tanaman pangan melalui peningkatan produktivitas hasil tanaman pangan dan intensifikasi komoditas, perluasan areal tanam

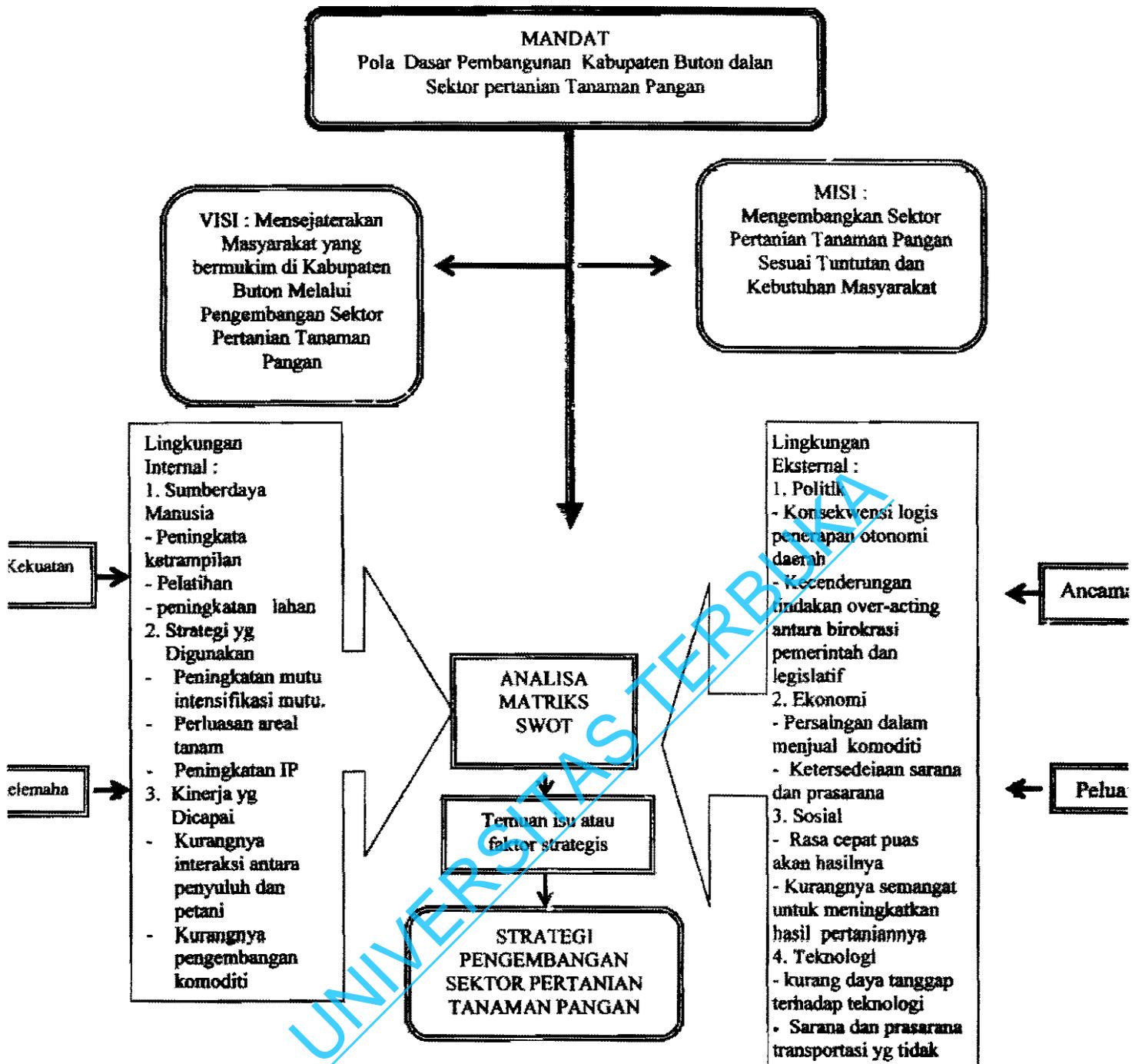
Kelemahan sumberdaya yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Buton nampak masih banyak lahan kering yang belum tergarap karena kondisi alam yang tandus, keadaan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan yang harus ditingkatkan lagi kualitas dan panjang jalan menuju sentral produksi pertanian, kurangnya koordinasi antar instansi lain dalam memberdayakan para petani untuk mengembangkan komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Buton, dana yang terbatas, kurangnya interaksi antara para penyuluh lapangan dengan para petani untuk pengembangan komoditi unggulan.

Peluang pengembangan sektor pertanian tanaman pangan adalah adanya komitmen pemerintah melalui UU No 32 tahun 2004 untuk mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan secara mandiri sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat kabupaten Buton. Ancaman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Buton dalam

mengembangkan tanaman pangan adalah konsekuensi logis dan kewenangan otonomi, sehingga tarik menarik antara eksekutif dan legislatif dapat mengakibatkan munculnya Perda yang kontra produktif. Kompetisi pasar komoditi pertanian tanaman pangan dengan daerah sekitarnya seperti Muna, Bombana, Kota Bau-Bau, sifat cepat puas yang dimiliki masyarakat sehingga memperlambat dan mengganggu sustainability pembangunan pertanian tanaman pangan di Buton dan kurangnya daya terima para petani terhadap teknologi tepat guna yang dikembangkan di pertanian tanaman pangan. Secara skematis dapat diuraikan melalui bagan di atas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Bagan 2.1: Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenis datanya termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu untuk dapat menggambarkan dan mengungkap isu-isu strategis kebijakan peningkatan produk pertanian secara intensif, mendalam, dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menemukan strategi yang tepat bagi peningkatan produk pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton secara tepat.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari: 5 orang pegawai Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buton, 4 ketua kelompok tani, 3 orang pengusaha yang bergerak dibidang bisnis hasil bumi. Alasan penentuan jumlah informan seperti tersebut di atas, yaitu karena mereka adalah orang/individu yang dianggap paling mengerti dibidangnya. Selain itu, informan tersebut merupakan informan kunci (*key informan*) yang dapat memberikan data dan informasi yang akurat dan valid berkaitan dengan masalah kebijakan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton. Data yang peroleh tersebut juga merupakan bagian dari triangulasi data dari masing-masing informan kunci tersebut.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Studi dokumentasi yaitu dengan mengkaji berbagai bentuk laporan, jurnal, ataupun catatan-catatan harian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan maupun data dari BPS yang berisi data dan informasi kebijakan peningkatan produk pertanian di Kabupaten Buton.
2. Pedoman wawancara yaitu sejumlah pertanyaan disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam mengakses data informasi yang akan digunakan dalam analisis data penelitian ini.
3. Chek-list yaitu sejenis kuisisioner sebagai pelengkap (komplementer) untuk melihat fenomena yang ada sehubungan dengan permasalahan penelitian ini yang diakses dari informan penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini akan dimulai dengan melakukan inventarisasi data sekunder dengan berpedoman pada permasalahan penelitian ini.
- b. Dari data sekunder ini, sebuah draf kasar mengenai strategi yang tepat dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton melalui pendekatan strategik dapat dirumuskan.
- c. Atas dasar draf kasar ini, pedoman wawancara bisa dirumuskan secara detail guna mengungkap isu-isu strategik dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton.
- d. Terakhir analisis data dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian ini dan mengetahui kenyataan yang terjadi dilapangan.

E. Teknik Analisis Data

Alat analisa yang digunakan dalam memetakan isu atau faktor strategi adalah analisis SWOT sehingga dapat diketahui struktur serta tingkat strategis dari faktor-faktor tersebut. Dengan matriks SWOT ini dapat diketahui isu atau faktor-faktor strategis yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan.

Teknik analisa matriks SWOT merupakan tahap awal dalam menemukan isu strategis yang nantinya digunakan bagi penemuan strategi pengembangan sektor tanaman pangan di Kabupaten Buton. Diagram matriks SWOT dapat digambarkan pada bagan 2 berikut ini :

Bagan 3.1
Diagram Matriks Swot

IFAS EFAS	KEKUATAN (S) Identifikasi kekuatan	KELEMAHAN (W) Identifikasi kelemahan
PELUANG (O) Identifikasi kesempatan	STRATEGI (SO) Menggunakan kekuatan untuk menangkap kesempatan	STRATEGI (WT) Meminimalkan kelemahan dengan menghindari ancaman
ANCAMAN (T) Identifikasi ancaman	STRATEGI (ST) Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	STRATEGI (WT) Meminimalkan kelemahan dengan menghindari ancaman

Sumber : Wahyudi, Agustinus, 1996 : 105

Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan dari analisa matriks SWOT ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO (*Strength Opportunity Strategy*) yaitu strategi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada di lingkungan eksternal.
2. Strategi WO (*Weakness Opportunity Strategy*) yaitu strategi yang untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar.
3. Strategi ST (*Strength Threat Strategy*) yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar.
4. Strategi WT (*Weakness Threat Strategy*) yaitu strategi yang digunakan dengan memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi, sumberdaya alam dan tantangan, kendala maupun peluang dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton

Bab ini menyajikan data potensi hasil pembangunan pada sektor pertanian di Kabupaten Buton. Data tersebut meliputi penggunaan tanah, tanaman pangan (padi, palawija dan sayur-sayuran), serta menemukan strategi pengembangannya.

1. Penggunaan Tanah

Kabupaten Buton bisa juga disebut daerah agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Buton, 69,02 % digunakan untuk usaha pertanian, yaitu lahan untuk tanaman kayu/hutan perkebunan rakyat.

Pada tahun 2007 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian mencapai 171.781 ha sedangkan luas lahan yang tidak digunakan untuk pertanian mencapai 77.090 ha. Bila dirinci menurut penggunaannya tahun 2007, maka yang paling luas adalah hutan negara yaitu 68.882 ha (27,68%), perkebunan rakyat yang mencapai 42.466 ha (17,06%) kemudian lainnya seluas 37.497 ha (15,07%), tegal/kebun seluas 24.232 ha (9,74%), sementara tidak diusahakan seluas 23.463 ha (9,43%), hutan rakyat seluas 17.745 (7,13 %) dan ladang/huma seluas 17.275 ha (6,94%). Selain itu lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya seluas 7.789 ha (3,13%), padang rumput/penggembalaan seluas 7.293 ha (2,93%), rawa-rawa yang tidak ditanami 533

ha (0,21%), luas tanah sawah 1.059 ha (0,42%). Penggunaan lahan terkecil adalah sekitar 123 ha (0,05 %) untuk lahan tambak, kolam/tebat/empang, data rinci mengenai penggunaan lahan ini dapat dilihat pada tabel1 berikut ini.

Tabel 4.1. Luas Penggunaan Tanah Tiap Kecamatan Tahun 2007

	Kecamatan	Pekarangan	Luas Tanah Kering (Ha)		
			Tegal / Kebun	Ladang / Huma	Padang Rumput / Pengembalaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lasalimu	295	1.400	1.390	1.205
2	Lasalimu Selatan	1.103	789	3.000	-
3	Siontapina	225	1.674	1.210	532
4	Pasarwajo	426	3.317	-	184
5	Wabula	47	370	-	312
6	Wolowa	100	673	1.190	850
7	Sampolawa	524	2.132	-	192
8	Batu Atas	126	16	75	171
9	Lapandewa	248	810	-	980
10	Batauga	145	1.331	580	300
11	Siompu	50	170	-	1.300
12	Siompu Barat	35	60	-	450
13	Kadatua	160	362	400	-
14	Kapontori	400	753	960	400
15	Gu	351	1.594	815	232
16	Sangia Wambulu	235	257	-	-
17	Lakudo	755	2.584	2.248	-
18	Mawasangka	792	2.104	2.439	584
19	Mawasangka Timur	887	1.104	1.050	782
20	Mawasangka Tengah	279	1.155	2.116	20
21	Talaga Raya	552	306	-	312
	Jumlah 2007	7.789	24.232	17.275	7.273
	Jumlah 2006	7.691	22.981	17.573	8.806
	Jumlah 2005	7.670	21.065	16.005	8.743

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buton, 2008

Data tabel 4.1 di atas, tampak bahwa Kecamatan Lasalimu Selatan daerah yang memiliki luas lahan pekarangan terluas di Kabupaten Buton yakni 1.103 Ha, selanjutnya

kecamatan Mawasangka Timur sebesar 887 Ha, kecamatan Mawasangka yakni yang memiliki luas lahan adalah 792 Ha. Sedangkan daerah atau kecamatan yang paling kecil potensi pekarangannya adalah Siompu Barat seluas 35, demikian pula Kecamatan Wabula seluas 47 Ha dan Siompu seluas 50 Ha.

Sedangkan daerah/kecamatan yang memiliki lahan kering terluas di Kabupaten Buton adalah 3.317 Ha terdapat di Kecamatan Pasar Wajo selanjutnya diikuti oleh kecamatan Lakudo yaitu seluas 2.584 Ha, dan Sampolawa sebesar 2.132 Ha, sedangkan daerah/kecamatan yang memiliki luas lahan kering (tegal) dibawah seratus hektar adalah Kecamatan batu atas yaitu 16 Ha, Kecamatan Siompu barat yaitu 80 Ha, sedangkan kecamatan lainnya memiliki potensi luas lahan diatas 100 Ha.

Selanjutnya luas penggunaan tanah tiap kecamatan tahun 2007 untuk kategori ladang/Huma yang terluas di Kabupaten Buton adalah berturut-turut kecamatan Lasalimu Selatan yaitu 3.000 Ha, Kecamatan Mawasangka memiliki luas tanah kering (ladang/Huma) seluas 2.439 Ha, selanjutnya Kecamatan Lakudo yaitu 2.248 Ha Kecamatan Mawasangka Tengah yaitu 2.116 Ha sedangkan yang memiliki luas lahan terkecil adalah Kecamatan Batu Atas yaitu 75 ha. Sedangkan kecamatan yang memiliki padang rumput terluas adalah kecamatan Siompu yaitu 1.300 Ha, dan Kecamatan Lasalimu seluas 1.205 Ha. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Mawasangka Tengah seluas 20 Ha.

Data tabel di bawah, tampak bahwa luas tanah kering sementara tidak diusahakan di Kabupaten Buton hingga tahun 2007 adalah 23.463 Ha. Dilihat perkecamatan maka kecamatan yang memiliki luas tanah kering yang sementara tidak diusahakan secara berturut-turut adalah Kecamatan Mawasangka yakni 5.112 Ha, Kecamatan Mawasangka Tengah 3.623 Ha,

selanjutnya Kecamatan Lakudo 3.132 Ha dan yang paling sempit tanah kering yang sementara tidak diusahakan adalah terdapat di Kecamatan Gu yaitu 114 Ha dan Batu atas, 115 Ha dan Sangia Wambulu 174 Ha.

Lanjutan Tabel.4.1.

	Kecamatan	Luas Tanah Kering (Ha)			
		Sementara Tidak Diusahakan	Ditanami Pohon / Hutan Rakyat	Hutan Negara	Perkebunan Rakyat
	(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Lasalimu	914	1.211	17.000	1.642
2	Lasalimu Selatan	364	1.000	-	1.150
3	Siontapina	1.045	440	10.000	1.875
4	Pasarwajo	538	-	16.783	4.979
5	Wabula	1.003	994	-	1.305
6	Wolowa	1.109	1.095	-	1.148
7	Sampolawa	1.875	2.187	2.757	2.717
8	Batu Atas	115	33	-	56
9	Lapandewa	459	-	-	1.350
10	Batauga	247	-	1.500	1.880
11	Siompu	239	650	-	160
12	Siompu Barat	143	75	-	75
13	Kadatua	200	500	-	613
14	Kapontori	321	4.290	1.736	1.740
15	Gu	114	528	4.389	2.281
16	Sangia Wambulu	174	-	-	267
17	Lakudo	3.132	1.200	4.436	5.951
18	Mawasangka	5.112	2.572	4.777	6.511
19	Mawasangka Timur	2.102	120	3.736	2.933
20	Mawasangka Tengah	3.623	160	1.768	3.126
21	Talaga Raya	1.103	750	-	1.087
	2007	23.463	17.745	68.882	42.466
	2006	29.179	17.534	68.882	43.445
	2005	33.996	15.419	66.662	41.366

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buton, 2008

Sementara itu, luas tanah kering yang ditanami pohon/hutan rakyat di Kabupaten Buton hingga tahun 2007 adalah 17.745 Ha. Dilihat perkecamatan, maka kecamatan-kecamatan yang memiliki luas tanah kering dan ditanami pohon atau hutan rakyat secara

berturut-turut adalah Kecamatan Kadatua, yakni 4.290 Ha, Kecamatan Mawasangka yaitu 2.572 ha, Kecamatan Sampolawa yaitu 2.187 Ha, sedangkan yang tersempit adalah kecamatan Batu Atas yaitu 33 ha, Siompu Barat yaitu 75 Ha, Kecamatan Mawasangka Timur yaitu 120 Ha, Mawasangka Tengah yaitu 160 Ha.

Sementara itu, luas tanah kering yang merupakan hutan negara di Kabupaten Buton hingga tahun 2007 adalah 68.882 Ha. Dilihat perkecamatan, maka kecamatan-kecamatan yang memiliki luas tanah kering dan mempunyai hutan negara secara berturut-turut adalah Kecamatan Lasalimu yaitu 17.000 Ha, Kecamatan Pasarwajo yaitu 16.783 Ha, dan Kecamatan Siontapina yaitu 10.000 Ha sedangkan yang memiliki hutan negara yang paling sempit di Kabupaten Buton adalah Kecamatan Batauga yaitu 1.500 Ha, Mawasangka Tengah yaitu 1.768 Ha dan Kecamatan Kapontori yaitu 1.736 sedangkan beberapa kecamatan lainnya tidak memiliki hutan negara seperti Talaga Raya, Sangia Wambula, dan Siompu Barat.

Sementara itu, luas tanah kering yang merupakan perkebunan rakyat di Kabupaten Buton hingga tahun 2007 adalah 42.466 Ha. Dilihat perkecamatan, maka kecamatan-kecamatan yang memiliki luas tanah kering dan mempunyai hutan negara secara berturut-turut adalah Kecamatan Mawasangka yaitu 6.511 Ha, Kecamatan Lakudo yaitu 5.951 Ha, dan tanah perkebunan tersempit adalah Kecamatan Batu Atas, yaitu 56 Ha, Siompu Barat yaitu 75 Ha, dan Sangia Wambula yaitu 267 Ha. Sementara itu, luas tanah kering yang belum dimanfaatkan atau (lain-lain) di Kabupaten Buton hingga tahun 2007 adalah 37.947 Ha. Dilihat perkecamatan, maka kecamatan yang memiliki luas tanah kering dalam kategori lain-lain secara berturut-turut adalah Kecamatan Pasarwajo yaitu 9.675 Ha dan Lasalimu yaitu 6.860 Ha dan sawa rawa yang tidak ditanami terluas di Kecamatan Mawasangka yaitu 527 Ha.

Lanjutan Tabel .4.1

	Kecamatan	Luas Tanah Kering (Ha)			
		Lain-Lain	Rawa-rawa (yang tidak ditanami)	Tambak	Kolam/ Tebat/ Empang
	(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Lasalimu	6.860	-	-	-
2	Lasalimu Selatan	1.682	-	-	-
3	Siontapina	975	-	-	1
4	Pasaryajo	9.675	-	-	-
5	Wabula	685	-	-	-
6	Wolowa	489	-	-	-
7	Sampolawa	2.876	-	-	-
8	Batu Atas	116	-	-	-
9	Lapandewa	727	-	-	-
10	Batauga	1.875	-	-	-
11	Siompu	112	-	-	-
12	Siompu Barat	106	-	-	-
13	Kadatua	103	-	-	-
14	Kapontori	587	4	-	-
15	Gu	-	-	-	-
16	Sangia Wambulu	117	-	-	-
17	Lakudo	2.476	2	15	15
18	Mawasangka	1.975	527	-	91
19	Mawasangka Timur	1.387	-	-	-
20	Mawasangka Tengah	2.135	-	-	-
21	Talaga Raya	2.989	-	-	-
	2007	37.947	533	15	107
	2006	31.077	533	15	108
	2005	36.241	533	15	109

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buton, 2008

Lanjutan Tabel 4.1.

	Kecamatan	Luas Tanah Sawah (Ha)			Jumlah Kolom 2 s/d 16
		Dlm 1 Th Ditanami Padi		Sementara Tidak Diusahakan	
		2 kali/lebih	Satu Kali		
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Lasalimu	154	177	52	32.106
2	Lasalimu Selatan	165	197	32	9.432
3	Siontapina	-	-	-	18.102
4	Pasarwajo	-	-	-	35.640
5	Wabula	-	-	-	5.158
6	Wolowa	-	-	-	6.502
7	Sampolawa	-	-	-	15.366
8	Batu Atas	-	-	-	718
9	Lapandewa	-	-	-	4.516
10	Batauga	-	-	-	7.583
11	Siompu	-	-	-	3.250
12	Siompu Barat	-	-	-	1.000
13	Kadatua	-	-	-	2.300
14	Kapontori	246	118	1	11.367
15	Gu	-	-	-	10.400
16	Sangia Wambulu	-	-	-	1.000
17	Lakudo	-	-	-	22.500
18	Mawasangka	2	2	-	27.155
19	Mawasangka Timur	-	-	-	12.623
20	Mawasangka Tengah	-	-	-	15.022
21	Talaga Raya	-	-	-	7.131
	2007	565	494	85	248.871
	2006	477	356	214	248.871
	2005	456	327	254	248.871

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Euton, 2008

Data tabel 4.1 (hingga lanjutan) di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2006 terlihat adanya konversi penggunaan tanah, antara lain ; pemanfaatan lahan untuk diusahakan mengalami peningkatan sebesar 14,58 persen yakni dari seluas 29.179 ha pada tahun 2006 menjadi 23.463 ha pada tahun 2007 dan terjadi pengurangan lahan tidak produktif yakni terlihat dari lahan padang rumput sebesar 1.533 ha atau sebesar

17,41 persen, dimana pada tahun 2006 sebesar 8.806 ha menurun menjadi 7.273 pada tahun 2007.

2. Rumah Tangga Pertanian

Dari 52.381 rumah tangga, 69.73% atau 36.544 rumah tangga adalah rumah tangga pertanian, dari jumlah tersebut 28.302 rumah tangga adalah pengguna lahan dan 8.242 rumah tangga bukan pengguna lahan. Kemudian dari jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan ada rumah tangga petani gurem sebanyak 10.680 rumah tangga atau 37,68%.

Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buton bahwa rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahannya untuk padi hanya 4.630 rumah tangga atau 12,68% dari jumlah rumah tangga pengguna lahan untuk pertanian. Separuh dari rumah tangga yang mengusahakan padi ini berdomisili di Kecamatan Lasalimu dan Lasalimu Selatan yaitu sebesar 2.869 rumah tangga atau 61,97% dari total 4.630 rumah tangga. Kemudian yang mengusahakan palawija 20.928 rumah tangga atau 57,30 % dari jumlah rumah tangga pertanian, yang mengusahakan padi dan palawija 22.878 rumah tangga atau 62,64% dari jumlah rumah tangga pertanian. Holtikultura 4.982 rumah tangga atau 13,64% dan perkebunan 10.576 rumah tangga atau 28,96% (Wawancara, Desember 2008).

Secara lebih rinci potret banyaknya rumah tangga pertanian, rumah tangga pertanian pengguna lahan, rumah tangga pertanian bukan pengguna lahan rumah tangga petani gurem menurut kecamatan tahun 2008 di Kabupaten Buton dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Banyaknya Rumah Tangga Pertanian, Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan, Rumah Tangga Pertanian Bukan Pengguna Lahan Rumah Tangga Petani Gurem Menurut Kecamatan Tahun 2008

Kecamatan	Rumah Tangga	Rumah Tangga Pertanian	Rmh Tgg Pert. Pengguna Lahan	Rmh Tgg Pert. Bkn Pengguna Lhn	Rmh Tgg Petani Gurem
Lasalimu	2.393	2.173	1.853	320	66
Lasalimu Selatan	5.609	4.966	4.482	484	510
Pasarwajo	8.048	5.112	3.922	1.190	1.049
Sampolawa	4.755	3.796	3.350	446	1.094
Batu Atas	1.411	1.345	1.118	227	1.097
Batauga	2.706	1.384	1.041	343	445
Siempu	3.521	3.142	2.803	339	2.476
Kadatua	1.620	1.091	716	375	716
Kapontari	2.815	2.263	1.677	586	243
Gu	5.356	2.664	1.904	760	577
Lakudo	4.699	2.823	1.696	1.127	585
Mawasangka	6.061	3.784	2.668	1.116	957
Mawasangka Timur	1.419	843	291	552	190
Talaga Raya	1.968	1.158	781	377	675
Jumlah	52.381	36.544	28.302	8.242	10.680

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton, 2008

3. Tanaman Pangan

Sub sektor tanaman bahan makanan adalah salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau.

Produksi padi sawah pada tahun 2007 mencapai 6.682 ton, mengalami peningkatan sebesar 53,75 persen dibandingkan dengan tahun 2006 yang hanya mencapai 4.476 ton. Meningkatnya produksi ini disebabkan meningkatnya luas panen dari 1.178 ha pada tahun 2006 menjadi 1.603 ha pada tahun 2007. Tanaman padi sawah di Kabupaten Buton hanya tersebar di beberapa kecamatan yaitu Lasalimu,

Lasalimu Selatan, Kapontori dan Mawasangka, dengan produksi terbesar pada tahun 2007 ini dihasilkan oleh Kecamatan Kapontori yaitu sebanyak 3.393 ton atau 49,30 persen dari total produksi padi sawah di Kabupaten Buton.

Produksi padi ladang tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,87 persen dari tahun sebelumnya dimana tahun 2006 mencapai 8.250 ton dan tahun 2007 hanya mencapai 8.178 ton. Menurunnya produksi tersebut sebagai akibat menurunnya produktifitas dimana pada tahun 2006 sebesar 25,97 kw/ha menjadi 24,41 kw/ha pada tahun 2007.

Untuk tanaman jagung, produksi pada tahun 2007 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006, dimana pada tahun 2007 mencapai 17.305 ton , sementara tahun 2006 hanya 15.959 ton atau 8,43 %. Peningkatan produksi tersebut sebagai akibat meningkatnya luas panen dari 6.493 ha pada tahun 2006 menjadi 7.142 ha pada tahun 2007, walaupun disisi produktifitas mengalami penurunan yaitu dari 24,58 kw/ha tahun 2006 menjadi 24,23 pada tahun 2007.

Untuk tanaman ubi kayu produksi yang dicapai pada tahun 2007 sebesar 73.363 ton, menurun 29,43 persen dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 103.954 ton. Penurunan produksi ini karena adanya penurunan produktifitas yang cukup besar yaitu dari 199,07 kw/ha tahun 2007 menjadi 184,56 kw/ha pada tahun 2006.

Sama dengan tanaman ubi kayu, ubi jalar mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 5.373 ton tahun 2006 menjadi 2.685 ton tahun 2007. Penurunan produksi tersebut seiring dengan penurunan luas panen sebesar 44,80 %, dari 587 ha tahun 2006 menjadi 324 ha tahun 2007 dan peningkatan produktifitas dari 91,53 kw/ha menjadi 82,87 kw/ha.

Tanaman kacang-kacangan di Kabupaten Buton yang mengalami penurunan pada tahun 2007 hanya kacang hijau, sedangkan tanaman kacang tanah dan kacang kedelai mengalami peningkatan produksi. Untuk tanaman kacang tanah naik dari 325 ton tahun 2006 menjadi 628 ton pada tahun 2007, dan tanaman kacang kedelai naik dari 247 ton tahun 2006 menjadi 611 ton pada tahun 2007. Sedangkan tanaman kacang hijau turun dari 116 ton tahun 2006 menjadi 96 ton pada tahun 2007.

Belum semua kecamatan yang ada di Kabupaten Buton mengembangkan tanaman kacang-kacangan. Kacang tanah hanya dikembangkan di Kecamatan Lasaiimu, Lasalimu Selatan, Siontapina, Pasarwajo, Wolowa, Wabula, Sampolawa, Lapandewa, Siompu, Kapontori, Gu dan Mawasangka. Kacang kedelai di Kecamatan Lasalimu Selatan, Siontapina, Pasarwajo, Wolowa, dan Kapontori, sedangkan tanaman kacang hijau hanya dikembangkan di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Siontapina, Pasarwajo, Wolowa, Kapontori, Sangia Wambulu dan Mawasangka.

Data Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari tahun 2005-2007 petani dominan mengembangkan tanaman jagung dan ubi kayu dibanding dengan jenis tanaman lainnya, sedangkan tanaman yang kurang dikembangkan adalah kacang hijau walaupun keberadaannya tetap dipertahankan setiap tahunnya. Hal ini berkorelasi dengan luas panen dari semua jenis tanaman yang ada. Di mana luas panen jagung dan ubi kayu merupakan areal yang paling dominan dibanding dengan luas panen jenis tanaman lainnya.

Tabel 4.3. Luas Tanam, Panen, Produktifitas Serta Produksi Tanaman Bahan Makanan Tahun 2005 – 2007

Jenis Tanaman		2005	2006	2007
(1)		(2)	(3)	(4)
I	Luas Tanam (Ha)			
1.1	Padi Sawah	985	1.150	989
1.2	Padi Ladang	2.564	2.455	2.567
1.3	Jagung	9.750	7.077	7.624
1.4	Ubi Kayu	4.215	4.681	4.984
1.5	Ubi Jalar	687	197	217
1.6	Kacang Tanah	372	141	498
1.7	Kacang Kedele	292	219	498
1.8	Kacang Hijau	91	43	71
II	Luas panen (Ha)			
2.1	Padi Sawah	897	1.178	1.603
2.2	Padi Ladang	2.669	3.177	3.350
2.3	Jagung	10.870	6.493	7.142
2.4	Ubi Kayu	5.770	5.222	3.975
2.5	Ubi Jalar	508	367	324
2.6	Kacang Tanah	305	428	322
2.7	Kacang Kedele	175	306	420
2.8	Kacang Hijau	83	193	78

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buton, 2008

Lanjutan Tabel 4.3. Luas Tanam, Panen, Produktifitas Serta Produksi Tanaman Bahan Makanan Tahun 2005 - 2007

Jenis Tanaman		2005	2006	2007
(1)		(5)	(6)	(7)
III	Produktifitas (KW/Ha)			
3.1	Padi Sawah	41,45	38,00	43,13
3.2	Padi Ladang	24,10	25,97	24,41
3.3	Jagung	22,98	24,58	24,23
3.4	Ubi Kayu	172,55	199,07	184,56
3.5	Ubi Jalar	81,77	91,53	82,87
3.6	Kacang Tanah	19,98	7,60	19,50
3.7	Kacang Kedele	15,49	8,07	14,55
3.8	Kacang Hijau	12,10	6,01	12,31
IV	Produksi (Ton)			
4.1	Padi Sawah	3.718	4.476	6.887
4.2	Padi Ladang	6.432	8.250	8.178
4.3	Jagung	24.979	15.959	17.305
4.4	Ubi Kayu	99.561	103.954	73.363
4.5	Ubi Jalar	4.154	5.373	2.685
4.6	Kacang Tanah	609	325	628
4.7	Kacang Kedele	271	247	611
4.8	Kacang Hijau	100	116	96

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buton, 2006

Dilihat dari aspek produktifitasnya, ubi kayu dan ubi jalar merupakan andalan yang memproduksi paling tinggi di antara jenis tanaman yang dikembangkan di Kabupaten buton. Hal ini tetap dipertahankan hingga dari tahun ke tahun. Sedangkan terendah adalah kacang hijau karena luas lahan yang dikembangkan juga terbatas.

Dilihat dari aspek produktifitasnya maka ubi kayu merupakan jenis tanaman yang memberikan kontribusi terbesar di antara jenis tanaman yang dikembangkan di Kabupaten buton. Selanjutnya diikuti oleh tanaman jagung merupakan jenis tanaman yang menjadi sektor andalan petani di Kabupaten Buton dari tahun ke tahun. Hal ini

sesuai dengan kondisi alam dan keadaan tanah yang berada pada ketinggian rata-rata di atas permukaan laut.

Lanjutan Tabel 4.3. Luas Tanam Tanaman Bahan Makanan Menurut Jenis Tanaman Tiap Kecamatan Tahun 2007 (Ha)

Kecamatan	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Ubi Kayu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Lasalimu	249	510	536	150
2 Lasalimu Selatan	182	573	718	142
3 Siontapina	-	425	55	17
4 Pasarwajo	-	156	280	44
5 Wabula	-	-	138	65
6 Wolowa	-	160	174	139
7 Sampolawa	-	412	595	626
8 Batu Atas	-	-	17	27
9 Lapandewa	-	-	663	482
10 Batauga	-	-	331	1.740
11 Siompu	-	-	25	145
12 Siompu Barat	-	-	21	27
13 Kadatua	-	-	323	24
14 Kapontori	556	327	239	94
15 Gu	-	-	1.509	165
16 Sangia Wambulu	-	-	61	37
17 Lakudo	-	-	430	280
18 Mawasangka	2	4	790	343
19 Mawasangka Timur	-	-	75	95
20 Mawasangka Tengah	-	-	560	300
21 Talaga Raya	-	-	85	42
2007	989	2.567	7.625	4.984
Jumlah 2006	1.150	2.455	7.077	4.681
2005	985	2.564	9.750	4.215

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buton, 2008

Data tabel di atas, tampak bahwa luas tanam tanaman bahan makanan menurut jenis tanaman tiap kecamatan tahun 2007 (ha) di Kabupaten Buton adalah untuk jenis tanaman padi sawah hanya dikembangkan di empat kecamatan yaitu Kapontori yaitu 556 Ha, Lasalimu 249 Ha, Lasalimu Selatan 182 Ha dan Kecamatan Mawasangka 2 Ha. Sedangkan padi ladang dikembangkan di delapan kecamatan yaitu Lasalimu

Selatan 573 Ha merupakan daerah terluas dikembangkan sedangkan Mawasangka hanya 4 Ha. Demikian pula halnya tanaman jagung dikembangkan di seluruh kecamatan dengan kawasan terluas adalah di Kecamatan Gu yaitu 1.509 Ha dan tersempit di Kecamatan Batu Atas yaitu 17 Ha dan Siompu Barat 21 Ha. Sama halnya jagung di kabupaten Buton juga dikembangkan tanaman ubi kayu di semua kecamatan dengan areal terluas terdapat di kecamatan Batauga yaitu 1.740 Ha dan tersempit di Kecamatan Kadatua seluas 24 Ha dan selanjutnya Kecamatan Batu Atas dan Siompu Barat masing-masing 27 Ha.

4. Tanaman Buah-Buahan

Produksi tanaman buah-buahan di Kabupaten Buton terdiri dari Alpokat, Belimbing, Duku/Langsar, Durian, Jambu Biji, Jambu Air, Jeruk, Mangga, Manggis, Nangka/Cempedak, Nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Salak, Sirsak, Sukun, Melinjo, dan Petai. Pada tahun 2007 produksi buah-buahan yang terbesar dihasilkan oleh pisang yaitu sebanyak 20.994 kw diikuti nangka sebanyak 20.550 kw, mangga sebanyak 5.513 kw, dan yang paling terkecil produksinya adalah tanaman manggis yang hanya sebanyak 2 ton (Dinas perkebunan Tanaman Pangan 2008).

5. Sayur-Sayuran

Berdasarkan data dokumentasi Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Buton tentang produktifitas dan produksi tanaman sayur-sayuran pada tahun 2007 ada 20 jenis tanaman sayur-sayuran yang dikembangkan di Kabupaten Buton. Bawang merah merupakan tanaman sayur-sayuran yang paling banyak dihasilkan yaitu 3.625

kw, menyusul terong 2.015 kw dan kubis sebesar 1.877 kw (Dokumentasi Dinas Tanaman Pangan, 2008).

8. Sub-sistem Input

Indek Pertanaman Kabupaten Buton tahun 2006 adalah IP rata-rata di lahan kering 247,37 %, IP rata-rata lahan basah 167,16%. Kemudian dibandingkan dengan IP tahun 2007, IP rata-rata di lahan kering 220,63%, IP rata-rata lahan basah 122,97%. Maka IP tahun 2007 mengalami kenaikan. Dari angka tersebut terlihat bahwa pola tanam jagung di lahan kering 2 kali dalam setahun dan 1 kali di lahan basah.

Perkembangan penggunaan jenis lahan selama tahun 2005 dan 2006 dapat dilihat pada tabel di atas. Ada variasi luas penggunaan lahan kering di tahun 2006 dan 2007 dilihat dari jenis penggunaannya.

Untuk penggunaan bukan lahan sawah yang berupa lahan kering juga terdapat berbagai variasi. Peningkatan terjadi di pekarangan tegal, perkebunan. Sementara penurunan terjadi pada padang rumput, hutan rakyat, hutan negara. Sementara lahan lainnya tidak mengalami perubahan yang berarti.

Benih sebagai bahan awal bagi proses produksi pertanian mengalami perkembangan yang positif di Kabupaten Buton. Di samping itu, penyebaran varietas padi dan palawija tahun 2006 dan tahun 2007. Dalam tabel tersebut di atas menunjukkan penyebaran varietas padi dan palawija (ton) pada tahun 2006 dan tahun 2008. Jenis varietas meliputi padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, kacang hijau, dan ubi jalar.

Untuk penggunaan bibit palawija memperlihatkan volume pemakaian yang cukup besar sesuai dengan kapasitas produksi pertanian yang ada di Kabupaten Buton. Hal ini, menunjukkan penggunaan varietas padi dan palawija tahun 2006 dan 2007. Varietas yang digunakan masih berkisar antara padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau.

Penyaluran pupuk kepada petani yang dilakukan oleh KUD di kabupaten mengalami kenaikan sesuai dengan kebutuhan para petani yang ada di Kabupaten Buton, disesuaikan dengan mekanisme pasar dan kebutuhan para petani akan pupuk yang ada. Dari seluruh jenis pupuk yang digunakan (Urea, NPK, SP 36, KCL, dan ZA) kesemuanya menunjukkan peningkatan penyaluran (ton) pada tahun 2006 / 2007 dan MT 2007 dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan stok penyediaan dan penggunaan pestisida adalah sebagai berikut:

1. Stok (penyediaan) tahun 2007

- Karbamat	: 200 liter	
- Karbofuran	: 450 Kg	
- Rodenfuram	: 350 Kg	
- Lain-lain	: Dejerang	: 50 Kg
	: Agensia hayati	: 75 Kg

2. Penggunaan tahun 2007

- Karbamat	: 160 liter
- Karbofuran	: 320 Kg
- Rodentisida	: 250 Kg

- Lain-lain : Belerang : 20 Kg
- Agensia Hayati : 75 Liter

Alat dan mesin pertanian yang ada di Kabupaten Buton sesuai dengan perkembangan serta transformasi sosial yang sedang terjadi di masyarakat pedesaan. Peralatan atau teknologi pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan mutu intensifikasi dan mengurangi efisiensi kehilangan hasil, jika diolah secara manual dengan menggunakan tenaga manusia semata.

Adapun perkembangan alat mesin pertanian yang ada di Kabupaten Buton selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2006 dan tahun 2007 adalah bervariasi. Terdapat variasi jumlah jenis alat dan mesin pertanian. Peningkatan jumlah terdapat pada Traktor roda dua dan traktor roda empat, traktor mini, alat penanam (*jebber*), alat tanam padi, pompa air diameter 2, pompa air diameter 4, pompa air diameter 6, power tresher, penggiling padi besar, rice milling unit, pemecah kulit gabah, pecah kulit, pemipil jagung, perajang singkong, pembuat chip, pembuat pelet, mesin tepung singkong, pengering (*drayer*) gabah, dan pengering (*drayer*) palawija. Sementara itu, jenis alat dan mesin pertanian yang menunjukkan penurunan jumlah terdapat pada aplikator (alat pemupukan urea tablet), *hand sprayer*, emposan tikus, pompa air diameter 3, sabit bergerigi, pedal tresher (perontok), penggiling padi kecil, penggiling jagung, grader buah, dan penggiling tepung. Peningkatan alat dan mesin yang sangat mencolok terdapat pada pompa air diameter 4 yang berjumlah 4.626 di tahun 2007 naik dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 80 unit (Dinas Pertanian Tanaman Pangan 2008).

9. Sub-sistem Produksi Pertanian

Ditinjau dari sub-sistem produksi sebagai suatu sistem agribisnis yang lebih luas, maka pergerakan sektor pertanian melalui penganeekaragaman tanaman pangan (tumpangsari) dan upaya pengenalan berbagai jenis tanaman pangan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan langkah maju. Untuk palawija di tahun 2004 panen (ha) menunjukkan angka 39.995, naik di tahun 2005 menjadi 42.023 dan terus naik di tahun 2006 berjumlah 48.643, namun mengalami penurunan di tahun 2007 menjadi 40.316. Sedangkan produksi Padi sawah tidak menunjukkan kestabilan produksi. Dari tahun ke tahun angka menunjukkan jumlah yang tidak tetap. Di tahun 2004 jumlah produksi (ton) menunjukkan angka 255.430, di tahun 2005 turun menjadi 234.901. Di tahun 2007 kembali naik menjadi 244.164 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan 2008).

Jumlah luas tanaman palawija ini, menunjukkan penurunan secara keseluruhan dari tahun sebelumnya (2005). Untuk tanaman jagung, insus (ha) menunjukkan penurunan sebesar 9.741, dan innum (ha) turun sebesar 38.468. Tanaman Kedelai (insus) juga mengalami penurunan 7.824 ha dan (innum) sebesar 12.931 ha. Begitu pula tanaman ubi kayu yang mengalami penurunan sebesar 107.875 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan 2008).

Untuk tanaman ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan sorgum luas tanaman palawijanya dapat dilihat dalam tabel ini. Secara umum jumlah luas tanaman di tahun 1999 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan produksi sayuran tahun 2007 realisasi luas panen dan produksi sayuran menurut jenis tanaman, rata-rata produksi terbesar (kw/ha) terdapat pada jenis tanaman wortel (66), diikuti oleh bawang putih (50,06), dan petersili/sawi (47,55) (Dinas Pertanian Tanaman Pangan 2008).

10. Sub-sistem Pemasaran

Geografi Kabupaten Buton yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan memiliki posisi strategis dan merupakan lahan yang cocok untuk perdagangan, salah satunya adalah perdagangan antar pulau yang berguna untuk saling memenuhi kebutuhan akan bahan-bahan penunjang bagi wilayah lain yang membutukannya. Karena ada kalanya suatu daerah memerlukan bahan yang ada didaerah lain atau ia hanya memiliki sedikit bahan-bahan yang dibutuhkan. Perdagangan antar pulau yang dicakup pada bab ini adalah nilai perdagangan antar pulau yang meliputi hasil bumi dan laut berupa hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil kehutanan yang dirinci menurut jenis barang pada masing-masing kelompok.

Volume perdagangan antar pulau dalam kurun waktu 2005-2007 mengalami perkembangan yang baik, dimana pada tahun 2005 tercatat sebesar 51,235 ton dengan nilai perdagangan sebesar Rp. 280.810.000. (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) pada tahun 2006 meningkat sebesar 69,775 ton, dengan nilai jual sebesar Rp. 427.162.500 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pada tahun 2007 terus meningkat sebesar 71.150 ton dengan nilai jual Rp. 505.604.100 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah). Hal ini seperti diuraikan pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4. Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2005 -2007

Tahun	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rupiah)
2005	51,235	280.810.000.
2006	69,775	427.162.500
2007	71,150	505.604.100.

Sumber : Kantor Dinas Perindag Kabupaten Buton, 2008

11. Sub-sistem Jasa Penunjang

Pasar merupakan sub-sub-sistem jasa penunjang yang cukup menentukan untuk bekerjanya sistem agribisnis secara terpadu dan lancar. Kabupaten Buton berupaya meningkatkan pelayanan pasar yang mendukung pembangunan sektor pertanian atau agribisnis supaya ada pergerakan perekonomian yang berkesinambungan dan berkembang.

Tabel 4.5. menggambarkan jumlah pasar di Kabupaten Buton tahun 2007. Kondisi pasar kabupaten secara umum dapat digunakan oleh masyarakat dalam proses jual beli. Jumlah pasar dirinci menurut jenisnya tiap kecamatan Tahun 2007 seperti diuraikan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5. Jumlah Pasar Dirinci Menurut Jenisnya Tiap Kecamatan Tahun 2008

Kecamatan		Pasar Umum	Pasar Ikan
(1)		(2)	(3)
1	Lasalimu	6	1
2	Lasalimu Selatan	6	1
3	Siontapina	4	-
4	Pasarwajo	9	4
5	Wabula	1	-
6	Wolowa	-	-
7	Sampolawa	2	1
8	Batu Atas	1	1
9	Lapandewa	1	-
10	Batauga	1	1
11	Siompu	3	1
12	Siompu Barat	-	-
13	Kadatua	1	1
14	Kapontori	7	-
15	Gu	3	-
16	Sangia Wambulu	3	-
17	Lakudo	9	-
18	Mawasangka	10	2
19	Mawasangka Timur	2	-
20	Mawasangka Tengah	-	-
21	Talaga Raya	2	-
Jumlah		71	14

Sumber : Kantor Dinas Perindag Kabupaten Buton, 2008

Berdasarkan data tabel di atas, jasa pasar di Kabupaten Buton terdiri dari pasar umum dan pasar ikan. Pasar umum sebanyak 71 pasar dan 14 buah pasar ikan. Pasar umum terbanyak di Kecamatan Masangka sebanyak 10 buah dan pasar ikan terbanyak 4 buah di Kecamatan Pasarwajo.

B. Analisis Isu Strategis

1. Tujuan Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Buton ditetapkan bahwa pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi seiring dengan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini berarti dalam melaksanakan pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan pendapatan negara, menghemat pengeluaran juga meningkatkan devisa negara. Dengan demikian dalam setiap upaya peningkatan produksi harus selalu dibarengi dengan peningkatan pendapatan.
2. Titik berat pembangunan adalah sumber daya manusia dengan bagian terbesar adalah petani beserta keluarganya. Setiap pembangunan harus berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia agar mampu mencapai tingkat terampil, maju dinamis dan mandiri sebagai pelaku utama pembangunan guna mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan.
3. Pengembangan hortikultura perlu mendapat prioritas untuk ditingkatkan dengan mengembangkan komoditas unggulan dan wilayah andalan yang berorientasi agribisnis sehingga mampu bersaing baik di dalam maupun luar negeri.

2. Visi

Visi yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam rangka pengembangan sektor tanaman pangan dengan konsep agribisnisnya adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan distribusi yang merata dan harga terjangkau.
2. Meningkatkan produktivitas hasil tanaman pangan dengan cara meningkatkan mutu intensifikasi komoditas prioritas dan spesifik lokasi.
3. Meningkatkan perluasan areal tanaman dengan menaikkan Indeks Pertanaman (IP) dan memanfaatkan lahan tidur, lahan genangan, lahan marginal, usaha tani konservasi dan intensifikasi di lahan Perhutani.

3. Misi

Misi yang dilakukan pemerintah kabupaten Buton, dan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

1. Melihat keadaan lahan di Kabupaten Buton, dan didorong untuk menyelamatkan keberadaan kawasan hutan dan pesisir dari ancaman sedimentasi maka muncul gerakan pembangunan perekonomian pedesaan yang berbasis kultural. Dengan agenda kegiatan yaitu:
 - a. Jurusan Penghijauan, Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah
 - b. Jurusan Pertanian lahan kering termasuk Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
 - c. Jurusan Industri kecil, kerajinan rakyat, pariwisata dan pertambangan
 - d. Jurusan perdagangan dan pemasaran hasil
 - e. Jurusan kebidanan dan pertumbuhan Koperasi/KUD serta berkembangnya pola kerja sama dengan pihak ke tiga atau bapak angkat.

Lima dasar kegiatan di atas menjadi kebijaksanaan umum di Kabupaten Buton dalam mengelola lahan pertanian yang harus dijadikan acuan dan pedoman bagi

para pembina, petugas, tokoh masyarakat dan semua pelaku dalam pembangunan pertanian.

2. Sejalan dengan tekad Pemerintah untuk kembali menempatkan Sektor Pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya, di samping upaya peningkatan produksi tanaman pangan, upaya pengembangan tanaman hortikultura juga perlu lebih mendapatkan perhatian. Agar tanaman hortikultura bisa berkembang menjadi bidang usaha yang benar-benar dapat diandalkan, diperlukan upaya pemilihan komoditi yang mampu memberikan keunggulan komparatif maupun kompetitif, sehingga dapat mendongkrak daya saing pada era globalisasi yang mengarah pada terwujudnya pasar bebas yang menciptakan iklim kompetisi di segala bidang.

Banyak komoditi hortikultura seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat-obatan selain bernilai ekonomi tinggi juga memberi peluang bagi tumbuhnya cabang usaha/kegiatan ekonomi lainnya. Hal tersebut selain memberi nilai tambah bagi produk hortikultura itu sendiri, juga sekaligus mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja pada berbagai tingkat keterampilan, sehingga lebih cepat berperan nyata dalam menggerakkan roda perekonomian wilayah.

Dengan lima dasar misi di atas, diharapkan akan mampu memberdayakan potensi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian tidak hanya terfokus di ibukota kabupaten/kecamatan, tetapi merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Buana.

4. Analisa Lingkungan Eksternal

Untuk memperoleh hasil yang optimal dari analisa SWOT, maka fenomena lingkungan eksternal perlu dikemukakan untuk memperoleh detail dan dimensi yang nantinya berguna untuk mengetahui faktor ancaman yang datangnya dari lingkungan eksternal maupun peluang yang diberikan oleh / lingkungan eksternal itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor-faktor eksternal yang perlu dan strategis diperhitungkan adalah faktor politik yang terjadi, perkembangan faktor ekonomi, perkembangan dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, dan yang terakhir adalah perkembangan dan kemajuan teknologi yang terjadi pada lingkungan eksternal.

Pada analisa lingkungan eksternal ini diidentifikasi berbagai peluang (*opportunities*) yang perlu dikembangkan pada sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton, serta berbagai ancaman (*threats*) yang perlu diantisipasi dan dicari jalan keluarnya pada masa yang akan datang. Analisis eksternal ini meliputi: aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi.

Aspek politik mencakup perkembangan lingkungan politik yang terjadi dalam hal ini menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang terkait langsung dengan proses pembangunan yang terjadi di daerah, baik berupa produk undang-undang, komitmen politik, maupun kemauan politik elit-elit di pusat dan di daerah. Demikian juga perkembangan interaksi politik yang terjadi dengan segala akibat dan dampak yang terjadi di permukaan. Dimensi politik ini akan berdampak atau menghasilkan suatu konsekwensi sebagai peluang ataupun sebaliknya sebagai ancaman.

Melihat perkembangan akhir-akhir ini, setelah arus reformasi yang melanda bangsa dan negara Indonesia, maka implikasi yang terjadi adalah masa penyesuaian atau transisi dari suatu kondisi masyarakat yang sebelumnya tertekan menjadi masyarakat yang memiliki kebebasan. Kebijakan pemerintah dalam penyaluran KUT (Kredit Usaha Tani) melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang banyak menimbulkan masalah. Di samping kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunia) yang dinilai belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Khusus untuk kabupaten Buton, maka masalah yang kurang lebih sama dihadapi oleh masyarakat, birokrat maupun aparat keamanan dalam mengatasi akses dari hinggar-bingar euforia reformasi, yang berakibat pada mudahnya emosi massa yang bersifat destruktif. Kabupaten Buton dan kota sekitarnya pun tak luput dari persoalan ini, apalagi secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Muna dan sekitarnya sehingga eskalasi politik juga mempengaruhi proses pembangunan yang ada.

Hasil wawancara dengan salah satu pengusaha agribisnis untuk produk jagung, mengemukakan perkembangan politik yang berhubungan dengan faktor ketertiban dan keamanan sebagai berikut:

"Sesungguhnya perkembangan Indonesia saat ini telah diperkirakan sebelumnya, sebagai akibat dari euforia reformasi dan demokrasi yang diterima secara dadakan. Namun yang dibutuhkan dunia usaha saat ini adalah jaminan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan semestinya. Apalagi dunia usaha yang sedang mengalami kesulitan ini sering terganggu dengan aktivitas demo sehingga melumpuhkan jalur transportasi dan distribusi barang antar daerah di Buton" (wawancara, Bapak Lukman, 10 desember 2008).

Padahal di pihak lain dengan adanya UU No. 32 tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah yang luas merupakan peluang bagi daerah untuk pengembangan dan kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat secara penuh, sesuai dengan kebutuhan aspirasi yang berkembang. Hal ini tentu berlaku juga pada sektor pengembangan pertanian tanaman pangan yang berpotensi dikembangkan sebagai andalan bagi pemasukkan kas daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus sektor ini bermanfaat bagi pergerakan ekonomi daerah yang nantinya dapat menjadi tumpuan bagi penyediaan lapangan pekerjaan masyarakat di kabupaten Buton.

Aspek ekonomi berhubungan dengan keterkaitan ekonomis sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton pada mekanisme pasar dengan daerah sekitarnya atau wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Buton. Dalam hal ini perkembangan sektor pertanian tanaman pangan di Buton dianggap bersaing melalui mekanisme pasar dengan wilayah lainnya dalam merebut pangsa pasar produk agribisnis yang ditawarkan.

Pada aspek ekonomi secara keseluruhan di Indonesia, memang terlihat bahwa kinerja perekonomian nasional belum lagi memadai akibat krisis ekonomi moneter yang berkepanjangan itu sejak tahun 1997. Namun bagaimanapun juga sektor agribisnis masih tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik, baik dari indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) maupun tingkat penyerapan tenaga kerja yang mampu diterima oleh sektor pertanian ini.

Hasil luas panen, produktivitas dan jumlah produksi tanaman pangan padi sawah, jagung, dan ubi kayu di Buton selama tiga tahun terakhir cukup memadai

sebagaimana di jelaskan data tabel di atas. Pengendalian hama dan penyakit kerusakan tanaman padi di tahun 2000 yang disebabkan oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) relatif kecil, hal ini antara lain disebabkan oleh :

- Keadaan iklim yang kurang menguntungkan untuk perkembangan OPT.
- Adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran petani dalam melakukan pengamatan dan pengendalian OPT secara dini (Pengendalian Hama Terpadu) telah disadari oleh petani.
- Adanya dukungan Dinas dalam hal membantu sarana pengendalian pada daerah yang merupakan sumber infeksi atau daerah yang terkena eksplos.
- Adanya usaha-usaha peningkatan tata pola tanam (gilir tanam, tanam serentak dan gilir varietas) yang relatif baik.

Penyebab kerusakan tanaman padi dibedakan menurut jenis organisme pengganggu tanaman. Penggerek Batang merupakan organisme pengganggu tanaman yang sering dialami atau paling tinggi intensitas serangannya. Selanjutnya tikus juga merupakan pengganggu tanaman yang cukup besar setelah hama penggerek batang. Sedangkan pengganggu lain seperti bercak daun coklat, busuk pelepah, uret, dan wereng coklat tidak dianggap dalam golongan jenis organisme pengganggu tanaman.

Hasil wawancara kepada Kepala Sub Bidang Dinas Tanaman Pangan mengemukakan pendapat mengenai kontribusi dari sektor pertanian tanaman pangan terhadap perekonomian daerah Buton sebagai berikut:

"Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, para petani justru banyak yang menikmati hasil panennya, karena terjadi kenaikan harga di pasar lokal terutama pasar luar negeri. Khusus untuk kabupaten Buton, terlihat dari indikator PDRB bahwa kontribusi yang diberikan sektor pertanian

sesungguhnya positif dan signifikan" (wawancara, Hj. Wa Ode Nurjana, 10 Desember 2008).

Pada aspek sosial terlihat adanya keinginan dari masyarakat setempat di kabupaten Buton untuk terlibat dan mengembangkan kehidupannya di sektor pertanian atau agribisnis ini secara total. Hal ini didasarkan atas pengalaman yang dialami bahwa sektor ini mampu memberikan kehidupan yang lebih baik dan terjadi peningkatan pendapatan yang positif dan berarti.

Masyarakat kabupaten Buton termasuk masyarakat yang dinamis dan ulet, sebagaimana masyarakat di Buton pada umumnya yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Keadaan tanah dan kondisi geografis yang sulit ini menjadikan masyarakat Buton menjadi individu yang tekun dan mampu bertahan terhadap kesulitan hidup. Inilah yang menjadi modal dasar bagi pengembangan sektor agribisnis yang pada umumnya membutuhkan ketekunan dan ketekunan dalam mengusahakannya.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Dinas Perkebunan mengemukakan pendapat mengenai faktor sosial yang hidup di masyarakat Buton sebagai berikut:

"Sebagian besar masyarakat di Buton adalah ulet dan tekun disebabkan oleh karakter tanah yang keras dan tandus, namun ada kelemahan juga yaitu rasa cepat puas yang dimilikinya terhadap hasil panen yang dicapai pada suatu periode masa tanam" (wawancara, Sadis, 10 Desember 2008).

Untuk aspek teknologi yang merupakan tuntutan dan perkembangan dunia modern dengan ketersediaan peralatan pertanian pada era menjelang globalisasi dan penerapan perdagangan bebas dunia dewasa ini yang harus

diantisipasi sejak awal, supaya pengoptimalan sumber daya untuk memenangkan kompetisi yang ada dapat dilakukan. Penerapan teknologi di sektor pertanian tanaman pangan pada kenyataannya merupakan hal yang tak terhindari lagi (*inevitable*). Kemajuan teknologi baik dari segi peralatan maupun dari segi varietas tanaman yang tersedia memberikan peluang bagi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, khususnya yang berlaku di kabupaten Buton.

Teknologi tentunya berkaitan dengan metode, cara atau teknik pengolahan pertanian yang dimiliki dan dikerjakan oleh para petani yang terlibat secara langsung dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton. Teknik pengerjaan ini tentu berkaitan dengan tingkat produktivitas yang diperoleh atau dihasilkan oleh para petani pada tanaman pangan yang ada dan menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang ada di kabupaten Buton dan wilayah sekitarnya.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Dinas Hortikultura mengemukakan masalah teknologi yang terjadi di kalangan petani Buton sebagai berikut:

"Petani di Kabupaten Buton pada umumnya telah menggunakan teknik penanaman yang moderen sesuai dengan perkembangan teknologi pertanian yang ada, namun upaya pengenalan dan penerapan teknologi tepat guna umumnya lambat juga karena para petani tidak mudah untuk mengubah kebiasaan menanam dan penggunaan pupuk yang selama ini dikenal. Pengembangan pupuk kompos dari hasil pengolahan sampah organik belum mendapat respons yang cepat dari para petani, karena kebiasaan menggunakan pupuk pestisida" (wawancara, Wayan Ariadi, 10 Desember 2008).

Data wawancara di atas, tampak bahwa petani di Kabupaten Buton telah bertransformasi di bidang pertanian tanaman pangan. Hal ini ditandai dengan

digunakannya alat-alat teknologi pertanian modern dalam bercocok tanam. Teknologi dimaksud adalah penggunaan obat-obatan dan pupuk lainnya.

5. Analisa Lingkungan Internal

Dalam analisa lingkungan internal yang menjadi titik perhatian adalah aspek sumber daya, strategi dan kinerja yang telah dicapai selama ini. Berbicara mengenai sumber daya yang dimiliki dalam rangka analisa strategis manajemen, maka yang akan dianalisa adalah sumber daya yang menentukan dalam rantai nilai (*value chain*) dan dianggap berpengaruh secara positif terhadap perkembangan sektor pertanian tanaman pangan Kabupaten Buton.

Tabel di atas pada topik Penggunaan Tanah menggambarkan luas tanah pertanian yang ada di kabupaten Buton tahun 2008. Kecamatan Lasalimu Selatan merupakan kecamatan yang lahannya terluas di antara kecamatan yang ada di kabupaten Buton. Lahan-lahan ini pada umumnya merupakan lahan tadah hujan dengan rata-rata panen 2 kali dalam satu tahun.

Pertanyaan yang ditunjukkan kepada Sub Bidang Hortikultura Bapak Ir. Wayan Ariadi mengemukakan bahwa: "sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten Buton adalah lahan yang terdiri dari tanah tegalan dan tanah kering sehingga amat cocok untuk tanaman jangka panjang dan tanaman keras" (Wawancara, 10 Desember 2008).

Sedangkan strategi apa sajakah yang telah dikerjakan atau dilakukan selama ini oleh institusi berkompeten dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan kabupaten Buton, maka akan diteliti atau dianalisa program kerja dari Dinas Pertanian

Tanaman Pangan selama beberapa tahun terakhir ini dalam rangka pengembangan sektor pertanian atau agribisnis tanaman pangan di wilayah kabupaten Buton.

Strategi yang telah dilakukan pada waktu yang lalu oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai lembaga yang secara yuridis berkompeten dalam mengelola perkembangan sektor pertanian tanaman pangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktifitas hasil tanaman pangan melalui peningkatan mutu intensifikasi komoditas.
- b. Perluasan areal tanam dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan memanfaatkan lahan tidur, lahan genangan, lahan marginal, usaha tani konservasi dan intensifikasi di lahan Perbutani.
- c. Peningkatan perekonomian pedesaan dengan berpegang teguh pada 5 landasan kegiatan yaitu :
 1. Jurusan Penghijauan, Rehabilitasi lahan dan Konservasi Tanah.
 2. Jurusan Pertanian lahan kering termasuk Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
 3. Jurusan Industri kecil, kerajinan rakyat, pariwisata dan pertambangan.
 4. Jurusan Perdagangan dan Pemasaran hasil.
 5. Jurusan Kehidupan dan Pertumbuhan Koperasi/KUD serta berkembangnya pola kerja sama dengan pihak ketiga atau bapak angkat.

Sedangkan proyek-proyek pendukung program kegiatan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton, baik yang bersumber dari APBN, APBD I dan APBD II Tahun Anggaran 2008.

Hasil wawancara yang ditujukan kepada Kepala Koperasi Bina Desa mengemukakan bahwa :

"Strategi yang dijalankan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan secara umum telah memenuhi syarat, hanya saja upaya pemberdayaan terhadap para petani belum terlihat optimal, karena kurang melibatkan peran dari Koperasi sebagai wadah kerja para petani yang ada" (wawancara, Salim, 10 Desember 2008).

Dan mengenai hasil atau kinerja yang telah diperoleh selama ini sebagai proses agregasi program dan mekanisme pasar disektor pertanian tanaman pangan, maka dapat diketahui melalui tingkat produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, perkembangan dari adanya sarana dan prasarana, serta kinerja kontribusi sektor tanaman pangan yang sudah dijalankan selama ini.

Perkembangan sektor pertanian tanaman pangan dilihat dari sudut pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten Buton terlihat mengalami peningkatan. Pada tabel 4.6 di bawah ini menggambarkan perbandingan perolehan penerimaan keuangan daerah dari seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sektor pertanian, seperti berikut ini: Berdasarkan Perhitungan Regional Bruto yang telah dilakukan, Keadaan Perekonomian kabupaten Buton tahun 2007 dari Sektor Pertanian masih memberikan sumbangan paling besar seperti diuraikan tabel berikut.

Tabel 4.6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006 - 2007 (Jutaan Rp.)

Lapangan Usaha	2006	2007
Pertanian	575.469,60	648.394,95

Sumber: Dinas Perindag Kabupaten Buton, 2008.

Tabel di atas, memperlihatkan struktur perekonomian Kabupaten Buton tahun 2006-2007. Sumbangan per sektor terbesar diperoleh dari Sektor Pertanian dengan Rp. 575.469,60 di tahun 2006 dan Rp. 648.394,95 di tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan sektor pertanian terhadap komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup positif. Jadi walaupun terjadi krisis ekonomi dari akhir tahun 1997 hingga sekarang, namun kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian cukup besar dan positif.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada pengusaha tepung singkong terhadap kinerja yang telah dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan kabupaten Buton, dikemukakan bahwa :

"Kinerja yang telah dicapai itu belumlah maksimal, disebabkan oleh kurangnya atau keterbatasan dana pengembangan sektor pertanian yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan" (wawancara, Ibu Wa Batima, 10 Desember 2008).

C. Analisa SWOT

Berdasarkan analisa dan temuan isu strategis di atas, maka dapatlah diidentifikasi faktor eksternal dan faktor internal yang dimiliki kabupaten Buton dalam rangka pengembangan sektor pertanian tanaman pangan yang ditinjau dari sisi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) bagi lingkungan eksternal, maupun kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang ada dari sisi lingkungan internalnya. Dimensi-dimensi inilah yang akan diselaraskan dalam teknik analisa matriks SWOT untuk mendapatkan isu strategis sektor pertanian tanaman pangan bagi perolehan strategi yang tepat dan handal di masa mendatang.

Pada awal bab ini telah dilakukan pendalaman serta kajian terhadap faktor-faktor eksternal yang dianggap relevan dan secara positif mempengaruhi perkembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton secara keseluruhan. Selanjutnya pada bagian berikut ini dimiliki oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan".

Berdasarkan analisa dan temuan isu strategis diatas, maka dapatlah diidentifikasi faktor eksternal dan faktor internal yang dimiliki kabupaten Buton dalam rangka pengembangan sektor pertanian tanaman pangan yang ditinjau dari sisi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) bagi lingkungan eksternal, maupun kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang ada dari sisi lingkungan internalnya. Dimensi-dimensi inilah yang akan diselaraskan dalam teknik analisa matriks SWOT untuk mendapatkan isu strategis sektor pertanian tanaman pangan bagi perolehan strategi yang tepat dan handal di masa mendatang.

1. Faktor Eksternal

Pada awal bab ini telah dilakukan pendalaman serta kajian terhadap faktor-faktor eksternal yang dianggap relevan dan secara positif mempengaruhi perkembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton secara keseluruhan. Selanjutnya pada bagian berikut ini akan disajikan secara ringkas faktor-faktor eksternal yang dianggap sebagai peluang (*opportunity*) yang dapat memberikan kontribusi bagi arah kemajuan sektor pertanian tanaman pangan ini, dan juga beberapa ancaman (*threat*) yang ditemukan untuk diantisipasi secara dini dalam upaya mencari

strategi yang tepat dan handal untuk mengatasi dan memenangkan tingkat persaingan yang terjadi pada lingkungan eksternal yang kadang sulit untuk diprediksi sebelumnya.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian kerangka atau landasan teori dan metode penelitian, bahwa yang menjadi titik perhatian untuk proses analisa adalah teknik analisa matriks SWOT pada faktor eksternal yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek teknologi yang ada di kabupaten Buton, maka analisa berikut ini akan dipotret faktor eksternal itu pada sisi peluang atau ancaman yang ada.

a. Peluang

1. Aspek politik yang termanifestasi sebagai peluang adalah era reformasi yang menghasilkan UU No. 32 Tahun 2004, sebagai pedoman dan landasan adanya kemandirian daerah dalam pelaksanaan program pembangunan secara integral, dan secara khusus dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan bagi kemakmuran rakyat, yaitu masyarakat yang berdiam di kabupaten Buton.

Peluang dalam aspek politik ini bila dimanfaatkan secara maksimal akan mampu mendatangkan harapan untuk memperbaiki masa depan masyarakat Buton, karena adanya keleluasaan dan kemandirian dalam pembuatan program dan pelaksanaan proyek disektor pertanian tanaman pangan yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan yang ada di masyarakat kabupaten Buton.

2. Aspek ekonomi, dari kajian dan analisa yang dilakukan seperti tersebut di atas diketahui bahwa ada peluang yang besar dari sektor pertanian tanaman pangan untuk dikembangkan secara optimal. Potensi luas lahan dan sumber daya lainnya seperti ketersediaan sarana dan prasarana pengairan yang ada cukup memadai

untuk mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan, mengingat berbagai macam komoditi pertanian dan hortikultura yang ada di Kabupaten Buton ini.

3. Aspek sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Buton, dimana karakter masyarakat yang ulet, tekun, dan tidak cepat berputus asa. Keadaan alam yang sekitarnya yang terdiri dari bebatuan menciptakan karakter masyarakat yang tahan akan segala kesulitan yang dihadapinya. Semangat yang ada di tengah masyarakat adalah modal dasar dan utama dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan, khususnya pengembangan sektor pertanian tanaman pangan.
4. Aspek teknologi dalam pengolahan pertanian, khususnya tanaman pangan yang dimiliki oleh Kabupaten Buton pada kenyataannya cukup memadai dan ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana fisik yang ada untuk menunjang perkembangan sektor pertanian tanaman pangan ini. Demikian juga prasarana transportasi yang ada cukup memadai dalam menunjang perkembangan selanjutnya sektor pertanian tanaman pangan ini. Rata-rata sarana transportasi yang tersedia di Kabupaten Buton diusahakan oleh penduduk pribumi Buton sendiri, sehingga efek kesejahteraan pembangunan dapat dinikmati langsung oleh masyarakatnya.

b. Ancaman

1. Aspek politik yang berpotensi sebagai ancaman adalah konsekwensi logis dari penerapan otonomi daerah yang luas, mengakibatkan perubahan mekanisme kewenangan dan kecenderungan tindakan '*over-acting*' yang dilakukan oleh pihak birokrasi pemerintah daerah maupun pihak legislatif, sehingga banyak peraturan

- daerah yang dikeluarkan menimbulkan kontroversi dan ada kecenderungan mengakibatkan kontra produktif untuk pengembangan sektor pertanian tanaman pangan. Hubungan antara elemen eksekutif yang diwakili oleh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dengan elemen legislatif (DPRD Kabupaten Buton) merupakan faktor penting untuk memuluskan kelancaran pembangunan yang ada.
2. Aspek ekonomi yang muncul sebagai ancaman sesungguhnya merupakan mekanisme pasar yang datang secara alamiah, dengan adanya persaingan dalam menjual komoditi pertanian tanaman pangan yang dimiliki oleh kabupaten Buton dengan wilayah-wilayah yang ada disekitarnya, kabupaten Wakatobi, Muna. Hal ini sesungguhnya harus diperhitungkan oleh pengambil kebijakan agar alokasi sumber daya yang ada dapat dioptimalkan.
 3. Aspek sosial yang ada dimasyarakat yang dapat menjadi ancaman bagi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan kabupaten Buton adalah rasa cepat puas akan hasil yang telah dicapai selama masa produksi. Faktor ini harus diperhitungkan dalam pengembangan kelembagaan bagi suatu program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton.
 4. Aspek teknologi yang dapat berkembang sebagai ancaman adalah kurangnya daya tanggap atau adaptasi masyarakat terhadap teknologi tepat guna tertentu yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton. Faktor ini harus diperhitungkan agar mampu mengantisipasi kendala aplikasi teknologi dalam pembangunan pertanian yang ada.

2. Faktor Internal

Faktor internal dalam analisa teknik Matriks SWOT meliputi pengkajian aspek-aspek sumber daya alam yang dimiliki kabupaten Buton dalam upaya pengembangan sektor pertanian tanaman pangannya, strategi yang selama sudah dijalankan, dan yang terakhir adalah kinerja atau performance yang sudah dihasilkan dari keseluruhan hubungan antara strategi dan proses implementasi yang telah dilakukan. Ketiga aspek ini akan diletakkan pada dimensi kekuatan yang dapat digunakan pada masa yang akan datang, dan kelemahan yang seharusnya diantisipasi secara dini, serta dilakukan pembenahan bagi peningkatan perkembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton.

Pada bagian berikut ini akan dipaparkan secara ringkas semua aspek yang ada baik sumber daya, strategi, maupun kinerja pada tataran kekuatan dan kelemahan dalam rangka analisa matriks SWOT itu.

1. Kekuatan

1. Aspek sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Buton:

- Luas lahan yang cukup luas untuk melakukan pengembangan dan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan di Kabupaten Buton.
- Perluasan lahan-lahan kering yang digunakan bagi penanaman tanaman pangan sebagai upaya diversifikasi komoditi tanaman pangan yang ada.

2. Aspek strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton sebagai organisasi yang berwenang:

- Meningkatkan produktifitas hasil tanaman pangan melalui peningkatan mutu intensifikasi komoditas.
- Perluasan areal tanam dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan memanfaatkan lahan tidur, lahan genangan, lahan marginal, usaha tani konservasi dan intensifikasi di lahan Perhutani.
- Mengembangkan Model sistem komoditas unggulan padi, jagung, kedelai, buah-buahan.
- Adanya lima dasar gerakan pembangunan perekonomian pedesaan yang terdiri dari 5 (lima).

3. Aspek kinerja (performance result) yang telah ada selama ini:

- Adanya tingkat produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, perkembangan dari adanya sarana dan prasarana.
- Perkembangan sektor pertanian tanaman pangan dilihat dari sudut pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Buton terlihat mengalami peningkatan.
- Berdasarkan Perhitungan Regional Bruto yang telah dilakukan. Keadaan Perekonomian Kabupaten Buton tahun 2007 dari sektor pertanian masih memberikan sumbangan paling besar

2. Kelemahan

1. Sumberdaya yang ada di Kabupaten Buton:

- Masih banyak lahan kering yang belum tergarap karena kondisi alam yang tandus.

- Keadaan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan yang harus ditingkatkan lagi kualitas dan panjang jalan menuju sentral produksi pertanian.
2. Strategi yang sudah dijalankan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton sebagai suatu kelemahan yang harus diantisipasi sejak awal adalah sebagai berikut:
- Kurangnya koordinasi antar instansi lain dalam memberdayakan para petani untuk mengembangkan komoditi unggulan yang ada di kabupaten Buton.
 - Program yang dijalankan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan kabupaten Buton memiliki keterbatasan dana untuk menjalankan program pengembangan pertanian secara optimal.
3. Kinerja atau performance yang selama ini ada dan menjadi suatu faktor yang melemahkan adalah sebagai berikut:
- Kurangnya interaksi antara para penyuluh lapangan dengan para petani untuk pengembangan komoditi unggulan.
 - Kurangnya pengembangan komoditi hortikultura yang ternyata pada masa krisis ekonomi Indonesia dapat menjadi produk pertanian unggulan.
 - Belum adanya balai penelitian dan pengembangan komoditi pertanian unggulan di kabupaten Buton untuk melakukan penelitian pada komoditi unggulan yang sesuai dengan karakter geografis yang ada.

D. Ringkasan Matriks SWOT

Berangkat dari hasil analisa dan sintesa yang dibangun melalui narasi tersebut di atas dalam kerangka berpikir manajemen strategik dan penggunaan teknik analisa

matriks SWOT, maka berikut ini dapatlah disusun rangkuman SWOT (summary SWOT) dalam rangka pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton sebagai terlihat pada bagan 4.3 di bawah.

Bagan 4.3. Ringkasan Matriks SWOT

Faktor-Faktor Strategi Eksternal	Faktor-Faktor Strategi Internal
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004, memberikan kesempatan kabupaten Buton mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan secara mandiri sesuai keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat. 2. Keleluasaan untuk melaksanakan program dan proyek pengembangan sektor pertanian tanaman pangan kabupaten Buton. 3. Tersedianya lahan yang cukup luas untuk melakukan pengembangan komoditi unggulan. 4. Letak Buton yang berdekatan dengan kota Bau-Bau, Makassar, menjadikan kabupaten ini memiliki kesempatan untuk memasarkan komoditi pertanian yang ada. 5. Adanya komoditi unggulan yang dapat berproduksi secara skala besar yaitu padi, ubi kayu, kacang-kacangan. 	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan yang ada cukup memadai untuk mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan di Buton. 2. Karakter tanah kering dan tegalan mampu menghidupi tanaman jangka panjang dan tanaman unggulan tertentu seperti tebu dan ubi kayu. 3. Strategi pembangunan ekonomi pedesaan yang berupaya memberdayakan petani Buton secara integral. 4. Masyarakat yang berjiwa kerja keras, ulet dan tekun dalam melakukan usaha tani. 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan sektor pertanian tanaman pangan seperti jalan dan alat transportasi.
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsekuensi logis dari kewenangan otonomi, sehingga tarik menarik antara eksekutif dan legislatif dapat mengakibatkan munculnya Perda yang kontra produktif. 2. Kompetisi pasar komoditi pertanian tanaman pangan dengan daerah sekitarnya seperti Bau-Bau, Bombana, Wakatobi, Muna. 3. Sifat cepat puas yang dimiliki masyarakat sehingga memperlambat dan mengganggu sustainability pembangunan pertanian tanaman pangan di Buton. 4. Kurangnya daya terima para petani terhadap teknologi tepat guna yang dikembangkan di pertanian tanaman pangan. 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah daerah bagi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton. 2. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan tersebut. 3. Kondisi jalan yang belum menjangkau sentra produksi komoditi unggulan pertanian tanaman pangan.

E. Matriks SWOT Dan Penjabaran Isu Strategis Hasil Temuan

Dari keseluruhan hasil analisa yang dilakukan di atas dengan bertolak dari teknik analisa matriks SWOT dan penerapan alur berpikir manajemen strategik, maka dapat disusun isu-isu strategis yang ditemukan, serta rangkuman strategi yang dapat diambil dari analisa teknik SWOT tersebut. Berdasarkan pengkajian dan analisa terhadap fakta yang ada dan berdasarkan asumsi yang dibangun dari kerangka berpikir manajemen strategik, maka dapat diperoleh strategi-strategi yang tepat dan handal untuk digunakan di masa mendatang dalam upaya pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton.

Pada bagan 4.4 berikut ini akan diperlihatkan secara menyeluruh hasil teknik analisa matriks SWOT baik faktor lingkungan eksternal untuk peluang dan ancaman, maupun faktor lingkungan internal untuk kekuatan dan kelemahan, sekaligus hubungan antar dimensi-dimensi tersebut dalam upaya memperoleh strategi yang tepat dan handal bagi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton dalam mengantisipasi semua kemungkinan pelaksanaan otonomi daerah secara luas di masa yang akan datang bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten Buton.

Adapun penjabaran dari ringkasan isu strategik hasil temuan analisa dan kajian teknik matriks SWOT adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Buton beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau, sedangkan jenis tanah adalah tanah latosol, litosol, dan grumusol hitam, topografi bergelombang, berbukit dan sebagian kecil dataran. Untuk itu komoditi

unggulan yang dapat dilakukan di kabupaten Buton adalah padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

2. Mengintegrasikan semua komponen yang ada untuk memperlancar arus kebutuhan pupuk, pestisida, dan barang penunjang lainnya seperti peralatan pertanian sehingga para petani tidak mengalami kesulitan ketika musim tanam tiba. Koperasi dapat mengambil peran sebagai distributor dengan pengawasan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada, termasuk pengusaha agribisnis harus diberikan kemudahan dalam berusaha (perijinan) sehingga sub-sistem pemasaran dari sistem agribisnis ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
3. Mempertahankan dan mengembangkan strategi pembangunan perekonomian masyarakat Desa yang telah terbukti berhasil meningkatkan sektor ini, terdiri dari 5 (lima) jurus yaitu jurus penghijauan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah ; jurus pertanian lahan kering termasuk perkebunan, perikanan dan perikanan ; jurus industri kecil, kerajinan rakyat, pariwisata dan pertambangan ; jurus perdagangan dan pemasaran hasil ; jurus kehidupan dan pertumbuhan Koperasi (KUD) serta berkembangnya pola kerja sama dengan pihak ketiga atau bapak angkat.
4. Perlunya penyuluhan secara berkesinambungan mengenai cara tepat bagi pengolahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas, terutama dalam penggunaan teknologi tepat guna.

Bagan 4.2. Matriks SWOT
Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Buton

<p align="center">Eksternal</p> <p align="center">Internal</p>	<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004, memberikan kesempatan kabupaten Buton mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan secara mandiri sesuai keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat. 2. Keleluasaan untuk melaksanakan program dan proyek pengembangan sektor pertanian tanaman pangan kabupaten Buton. 3. Tersedianya lahan yang cukup luas untuk melakukan pengembangan komoditi unggulan. 4. Letak Buton yang berdekatan dengan kota Bau-Bau, Makassar, menjadikan kabupaten ini memiliki kesempatan untuk memasarkan komoditi pertanian yang ada. 5. Adanya komoditi unggulan yang dapat berproduksi secara skala besar yaitu padi, ubi kayu, kacang-kacangan. 	<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsekuensi logis dan kewenangan otonomi, sehingga tarik menarik antara eksekutif dan legislatif dapat mengakibatkan munculnya Perda yang kontra produktif. 2. Kompetisi pasar komoditi pertanian tanaman pangan dengan daerah sekitarnya seperti Muna, Bombana, Kendari. 3. Sifat cepat puas yang dimiliki masyarakat sehingga memperlambat dan mengganggu sustainability pembangunan pertanian tanaman pangan di Buton. 4. Kurangnya daya terima para petani terhadap teknologi tepat guna yang dikembangkan di pertanian tanaman pangan.
<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan yang ada cukup memadai untuk mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan di Buton. 2. Karakter tanah kering dan tegalan mampu menghidupi tanaman jangka panjang dan tanaman unggulan tertentu seperti tebu dan ubi kayu. 3. Strategi Gerakan pembangunan ekonomi pedesaan yang berupaya memberdayakan petani Buton secara integral. 4. Masyarakat yang berjiwa kerja keras, ulet dan tekun dalam melakukan usaha tani. 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan sektor pertanian tanaman pangan seperti jalan dan alat transportasi. 	<p>1. Strategi Memanfaatkan Kekuatan & Mengisi Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan pada komoditi yang sesuai dengan karakter tanah & iklim setempat 2. Mengintegrasikan semua komponen yang ada dalam pengembangan pertanian tanaman pangan, baik Dinas, koperasi, para petani & para pengusaha. 3. Mempertahankan dan mengembangkan strategi gerakan pembangunan perekonomian desa yang telah terbukti berhasil meningkatkan sektor ini. 4. Melakukan penyuluhan secara berkala untuk meningkatkan cara tepat bagi pengembangan pertanian untuk meningkatkan produktivitas. 	<p>2. Strategi Memanfaatkan Kekuatan & Mengatasi Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemasaran komoditi pertanian tanaman pangan ke wilayah sekitarnya dengan mencetuskan sarana dan prasarana jalan maupun transportasi. 2. Menggunakan strategi pengembangan kelembagaan bagi kegiatan memperkenalkan teknologi untuk peningkatan produktivitas pertanian.
<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah daerah bagi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton. 2. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan tersebut. 3. Kondisi jalan yang belum terjangkau sentra produksi komoditi unggulan pertanian tanaman pangan. 	<p>3. Strategi Mengatasi Kelemahan & Mengisi Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan kesempatan bagi investor swasta untuk mengembangkan sektor ini melalui insentif dan kemudahan ijin. b. Pemberdayaan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton. 	<p>3. Strategi Mengatasi Kelemahan & Menghadapi Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi secara intensif antar instansi dalam menjalankan program pengembangan sektor pertanian tanaman pangan. b. Memberikan keluasaan petani dalam menggunakan teknologi maupun jenis pupuk yang ada bagi peningkatan produktivitas.

5. Meningkatkan pemasaran komoditi pertanian tanaman pangan ke wilayah sekitarnya dengan menyempurnakan sarana dan prasarana jalan maupun transportasi dengan tujuan membuka akses pasar dengan sentra produksi yang ada.
6. Menggunakan strategi pengembangan kelembagaan bagi kegiatan memperkenalkan teknologi untuk peningkatan produktivitas pertanian, artinya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga desa.
7. Memberikan kesempatan bagi investor dengan upaya kemudahan ijin, sehingga investor ini akan merasa belah dan mampu mengoptimalkan investasi di Kabupaten Buton.
8. Pemberdayaan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton, terutama dalam pengolahan data dan penyediaan data potensi pengembangan pertanian tanaman pangan.
9. Koordinasi secara intensif antar instansi dalam menjalankan program pengembangan sektor pertanian tanaman pangan. Bentuk kerja sama antar instansi ini penting agar kegiatan atau program pembangunan dalam upaya pengembangan pertanian tanaman pangan dapat dilakukan secara terpadu.
10. Memberikan keleluasaan petani dalam menggunakan teknologi maupun jenis pupuk yang ada bagi peningkatan produktivitas, yang sesuai dengan karakter tanah dan kondisi topografi setempat.

F. Matriks SWOT dan Identifikasi Isu Strategis

Dari keseluruhan hasil analisa telah ditemukan sepuluh isu strategis berdasarkan temuan fakta yang ada. Dari kesepuluh isu strategis ini, akan dianalisa

empat isu dominan yang tepat dan handal untuk digunakan dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Buton.

Ke empat isu dominan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Kekuatan dan Mengisi Peluang (SO)

Mengintegrasikan semua komponen yang ada dalam pengembangan pertanian tanaman pangan, baik Dinas, Koperasi, para petani dan para pengusaha.

2. Memanfaatkan Kekuatan dan Mengisi Ancaman (ST)

Meningkatkan pemasaran komoditi pertanian tanaman pangan ke wilayah sekitarnya dengan menyempurnakan sarana dan prasarana jalan maupun transportasi.

3. Mengatasi Kelemahan dan Mengisi Peluang (WO)

Pemberdayaan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton.

4. Mengatasi Kelemahan dan Menghadapi Ancaman (WP)

Memberikan keleluasaan petani dalam menggunakan teknologi maupun jenis pupuk yang ada bagi peningkatan produktivitas.

G. Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton

Setelah dilakukan analisa isu strategik melalui teknik analisa matriks SWOT sebagaimana yang telah dilakukan di atas, maka akan disampaikan strategi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan kabupaten Buton. Strategi yang tepat dan handal yang diperoleh dari analisa terhadap isu-isu strategis yang ditemukan melalui analisa matriks SWOT adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan semua komponen yang ada dalam pengembangan pertanian tanaman pangan, baik dinas, koperasi, para petani & para pengusaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton perlu dilibatkan untuk memperlancar arus kebutuhan pupuk, pestisida, dan barang penunjang lainnya seperti peralatan pertanian sehingga para petani tidak mengalami kesulitan ketika musim tanam tiba. Demikian juga peran koperasi dalam penyaluran (distribusi) pupuk, benih dan kredit usaha tani. Pemerintah daerah pun perlu memantau penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) yang pada waktu yang lalu dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga sesuai dengan misi dan tepat sasaran pada para petani dengan tidak melakukan rekayasa atau penyaluran fiktif. Demikian juga para pengusaha agribisnis harus diberikan kemudahan dalam berusaha (perijinan) sehingga sub-sistem pemasaran dari sistem agribisnis ini dapat berjalan dengan lancar. Kerja sama para *stake-holder* ini penting agar tidak terjadi *overlapping* (tumpang tindih) antar program atau proyek pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton, dan ini mampu mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai.
2. Meningkatkan pemasaran komoditi pertanian tanaman pangan ke wilayah sekitarnya dengan memnyempurnakan sarana dan prasarana jalan maupun transportasi. Hal ini untuk membuka akses pasar sentra produksi yang ada di Buton ke pasar sekitarnya maupun pasar luar kota. Untuk itu perlu mengkoordinir kegiatan ini dengan para pedagang antar kota yang melakukan transaksi komoditi tanaman pangan di kabupaten Buton.

3. Pemberdayaan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton, terutama dalam pengolahan data dan penyediaan data potensi pengembangan pertanian tanaman pangan, pengolahan strategi sebagai upaya memberikan masukan kepada Bupati (eksekutif) maupun kepada DPRD (legislatif), baik dalam penganggaran maupun masalah yang bersifat teknis. Untuk diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Dinas dan penyempurnaan perlengkapan kantor yang meliputi sistem komputerisasi untuk mempercepat kerja dan peningkatan produktivitas yang ada.
4. Memberikan keleluasaan petani dalam menggunakan teknologi maupun jenis pupuk yang ada bagi peningkatan produktivitas, yang sesuai dengan karakter tanah dan kondisi topografi setempat. Pupuk anorganik, pupuk organik (kompos) dapat digunakan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan dan jenis tanaman yang ada sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanaman secara optimal dan efektif. Untuk itu dibutuhkan pengendalian harga yang terjangkau dan masuk akal, sehingga mampu terjangkau oleh daya beli masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Buton.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian awal tujuan penelitian yang disebutkan bahwa penelitian ini berusaha untuk memperoleh suatu strategi yang tepat, jitu dan handal dalam upaya pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton. Oleh sebab itu kajian dan analisa isu atau faktor strategis sebagaimana dilakukan dengan teknik analisa matriks SWOT didapatkan strategi yang tepat untuk mengantisipasi perkembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton dimasa yang akan datang pada lingkungan yang cepat berubah dan bersifat turbulensi.

Kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan pada komoditi yang sesuai dengan karakter tanah & iklim setempat. Komoditi unggulan yang dapat dilakukan di Buton adalah padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.
2. Temuan strategi bagi pembangunan sektor pertanian tanaman pangan di Buton adalah dengan mengintegrasikan semua komponen yang ada dalam pengembangan dalam pertanian tanaman pangan, baik Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, koperasi, para petani, para pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat yang pada waktu yang lalu terlibat dalam penyaluran Kredit Usaha Tani.

3. Program pertanian tanaman pangan terbukti berhasil meningkatkan sektor pertanian tanaman pangan karena program ini mengintegrasikan aspek lingkungan, perdagangan, institusi, dan kesinambungan pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan.
4. Salah satu strategi untuk mengatasi belum optimalnya pengembangan pertanian tanaman pangan secara terpadu adalah dengan melakukan penyuluhan secara berkesinambungan mengenai cara tepat bagi pengolahan pertanian untuk meningkatkan produktifitas.
5. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan agribisnis secara keseluruhan belum optimal terutama untuk membuka akses pasar sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan.
6. Temuan bagi strategi yang tepat adalah memberikan kesempatan bagi investor swasta untuk mengembangkan sektor ini melakukan intensif dan kemudahan izin.
7. Strategi lain dari hasil temuan adalah memberikan keleluasan petani dalam menggunakan teknologi maupun jenis pupuk yang ada bagi peningkatan produktivitas, yang sesuai dengan karakter tanah dan kondisi topografi setempat.

B. Saran

Saran maupun rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil analisa dan temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan pada komoditi unggulan yang sesuai dengan karakter tanah dan iklim setempat, seperti padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu.

2. Untuk mencapai efektivitas pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton, maka perlu mengintegrasikan semua institusi yang ada, baik Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Koperasi, para petani, para pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Perlu adanya penyempurnaan, dan pengembangan kembali program pembangunan masyarakat desa yang telah terbukti berhasil meningkatkan sektor pertanian tanaman pangan dan pengalokasian dana pengembangan secara efektif.
4. memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pola pengolahan lahan secara tepat dengan ongkos yang serendah-rendahnya, seperti alternative kompos sebagai bahan pemupukan.
5. melakukan penyempurnaan sarana dan prasarana jalan maupun transportasi untuk membuka akses pasar, sentra produksi yang ada di kabupaten Buton ke pasar sekitarnya maupun luar kota.
6. mempermudah ruang gerak bagi investor swasta bagi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan ini mulai intensif dan kemudahan izin.
7. melakukan upaya pemberdayaan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton terutama dalam pengolahan data dan pembangunan pertanian bersama DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustam, Muhammad Idrus. (1990). *Gerak Penduduk, Pembangunan dan Perubahan Sosial, Kasus Tiga Komunitas Padi Sawah di Sulawesi Selatan*. Jakarta: UI Press.
- Adiwilaga, Anas. (1975). *Ilmu Usaha Tani*. Bandung: Alumni.
- Akib Tuwo, Muhammad. (2001). *Ekonomi Pertanian*. Kendari: Universitas Haluoleo.
- Bachtiar, Rivai. (1994). *Analisa Pendapatan Usahatani*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- Baruadi, Rudin. (1993). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Adopsi Pertanian Terhadap Modernisasi Pertanian Padi Sawah dan Petani Tambak di Sulawesi Selatan*. Bandung: Disertasi Doktor Universitas Padjajaran.
- Bryson, John. M. (2003). *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damiri, (1994). *Strategi Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buton. (2003). *Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buton Tahun Anggaran.
- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi. TM. (1993). *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Gani, Ascobat. (1988). *Indikator Kualitas Hidup Manusia dan Penduduk*. Jakarta: Prisma No. 9 LP3ES.
- Haris, Syamsudin. (2002). *Desentralisasi, Demokrasisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: AIPI.
- Hogwood, Brian W. and Lewis A. Gunn. (1998). *Policy Analysis Four the Real Work*. Oxford: Oxford University Press.
- Husen, Benyamin. (2005). *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Jakarta: Tifa.

- Islamy, Irfan M. (1989). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, Charles O. (1977). *An Introduction to the Study of Public Policy*, edisi kedua, North Scituate, Massachusates Duxbury Press.
- Kartosapoetra. (1988). *Pengantar Ilmu Ekonomi Produksi Pertanian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Karim, Abdul Gafar, (2003). *Kompletisitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Kaslan. (1992). *Seuntai Pengetahuan Tentang Usahatani Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Margonu, Slamet. (1984). *Materi Khusus Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Departemen Pertanian RI.
- Mosher. (1986). *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Mubiyarto. (1987). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Nawawi. H. (2000). *Manajemen Stratek, Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Nigro, F.A. dan Nigro, L.G. (1980). *Modern Public Administration*, New York: Harpen and Row, Publishers.
- Prayitno, Hadi. dan Licolin Arsyad. (1987). *Petani Desa dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Balai Penelitian Fakultas Ekonomi UGM.
- Qudrat Nugraha, Muhammad. (2007). *Manajemen Strategik Organisasi Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rangkuti, Preddy. (1997). *Analisis Swot Teknik-Teknik Membedah. Kasus Bisnis : Reorientasi Konsep Perencanaan Strategi untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: Gramedia.
- Rogers, Everet M. (1969). *Modernization Among Peasants : The Impact of Communication*. New York: Holt, Renehart and Winston, Inc.
- Salusu, J., (2008). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Jakarta: Grasindo.

- Samuelson dan Nordhaus. (1985). *Ekonomi Terjemahan Jakawasana*. Jakarta: Erlangga.
- Saragih, Bungaran. (2004) *Politik Pangan*. Yogyakarta: Cired.
- Siagian, S.P. (2004). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J. (1985). *Pengantar Ekonomi sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soeharjo, Ahmad. (1988). *Sendi-Sendi Pokok Usahatani*. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Soekartawi. (1991). *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Malang: Universitas Brawijaya
- _____. (1993). *Analisa Usahatani*. Jakarta: UI Press.
- _____. (1995). *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali.
- Soemarwoto. (1983). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Soemita. (1986). *Manajemen Keuangan*. Bandung: Sinar Baru.
- Sutopo, dan Sugiantoro. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: LAN.
- Warsito dan Yurwono, (2003). *Otonomi Daerah Compasity Bilding dan Pengantar Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Pedoman Wawancara
Penelitian Kebijakan Produk Pertanian Tanaman Pangan Melalui
Pengembangan Manajemen Strategi di Kabupaten Buton

Visi: Pertanyaan ditujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan

1. Apakah visi pengembangan pertanian tanaman pangan sudah sesuai dengan kondisi, tantangan, dan kebutuhan Daerah?

Mohon penjelasannya.....

Misi: Pertanyaan ditujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan pengurus koperasi Dinas pertanian Tanaman Pangan

2. Apakah misi yang dilakukan pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan Pertanian Tanaman Pangan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton?

Mohon penjelasannya.....

Sumber daya: Pertanyaan di tujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, anggota koperasi dan pengusaha

3. Menurut pendapat anda apakah sumber daya yang dimiliki Kabupaten Buton sudah memadai dalam rangka sektor Pertanian Tanaman Pangan?

Mohon penjelasannya

Kinerja yang telah diperoleh: Pertanyaan ditujukan kepada anggota koperasi, pengusaha ataupun para petani.

4. Menurut pendapat anda apakah kinerja yang dilakukan pemerintah Daerah (Dinas Pertanian Tanaman Pangan) sudah memadai dalam upaya peningkatan sektor Pertanian Tanaman Pangan? Mohon penjelasannya.....

Strategi yang digunakan: Pertanyaan ditujukan kepada pengurus koperasi, pengusaha atau para petani.

5. Otonomi daerah dapat diukur dari kemandirian daerah untuk mengatur rumah tangganya, menurut pendapat anda program manakah yang kurang mengena dalam rangka pengembangan sektor Pertanian Tanaman Pangan?

Mohon penjelasannya.....

Strategi yang digunakan: Pertanyaan di tujukan kepada pengurus Koperasi, Pengusaha atau para petani.

6. Implementasi otonomi diharapkan mampu memuaskan kebutuhan masyarakat, bagaimana pengamat anda mengenai kepuasan dan tanggapan pihak-pihak yang terlibat dalam program yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan sektor Pertanian Tanaman Pangan?

Mohon penjelasannya.....

Aspek politik: Pertanyaan di tujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

7. Faktor Politik apakah yang di anggap dominan dalam mendukung sektor Pertanian Tanaman Pangan? Mohon penjelasannya.....

Aspek politik: Pertanyaan di tujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

8. Dengan adanya peningkatan suhu politik pemerintah pusat, adalah pengaruh terhadap upaya peningkatan sektor pertanian di Kabupaten Buton.

Mohon penjelasannya.....

Prospek ekonomi: pertanyaan di tujukan kepada pengurus koperasi, pengusaha dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

9. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, di harapkan semua kebutuhan dan aspirasi petani dapat dipenuhi, faktor faktor sosial apakah yang bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan?

Mohon penjelasannya.....

Aspek sosial: pertanyaan ditujuka kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

10. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, di harapkan semua kebutuhan dan aspirasi petani dapat dipenuhi, faktor sosial apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan?

Mohon penjelasannya.....

Aspek sosial

Pertanyaan: Pertayaan ditujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan

11. Adakah penolakan yang dilakukan masyarakat dalam program yang dilaksanakan pemerintah Daerah untuk peningkatan sektor Pertanian Tanaman Pangan?

Mohon penjelasannya.....

Aspek teknologi: pertanyaan ditujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan

12. Diharapkan penerapan otonomi daerah menunjukan keluwesan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bagaimana respon dari pihak yang terkait terhadap peralatan maupun metode (Teknologi), Pertanian yang diperkenalkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam rangka peningkatan produktifitas Pertanian Tanaman Pangan?

Mohon penjelasannya.....

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA MENDALAM

Nama : Ir. Maiynu
 Pendidikan : Strata Satu
 Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton
 Alamat : Pasarwajo Kabupaten Buton
 Tanggal : 13 Desember 2008

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton, menjelaskan bahwa rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahannya untuk tanaman padi hanya 4.630 rumah tangga atau 12,68% dari jumlah rumah tangga pengguna lahan untuk pertanian. Separu dari rumah taangga yang mengusahakan padi ini berdomisili di Kecamatan Lasalimu dan Lasalimu Selatan yaitu sebesar 2.869 rumah tangga atau 61,79% dari total 4.630 rumah tangga. Kemudian yang mengusahakan palawija 20.928 rumah tangga atau 57,30% dari jumlah rumah tangga pertania, yang mengusahakan padi dan palawija 22.878 rumah tangga atau 62,64% dari jumlah rumah tangga pertanian. Hortikultura 4.982 rumah tangga atau 13,64% dan Perkebunan 10.576 rumah tangga atau 28,96%.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton juga menjelaskan perkembangan alat mesin pertanian yang ada di Kabupaten Buton selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2006 dan tahun 2007 adalah bervariasi. Terdapat variasi jumlah jenis alat dan mesin pertanian. Peningkatan jumlah terdapat traktor roda dua, Pompa air diameter 2, pompa air diameter 3, Penggilingan padi besar, *rice milling unit*, Pemipil jagung, pengering gabah (*drayer*) Sementara itu, jenis alat dan mesin pertanian yang menunjukkan penurunan jumlah pada aplikator (alat pemupukan urea tablet) dan sementara diusahakan yaitu pengadaan sumur tanah dalam sebanyak 2 unit.

Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton menjelaskan Visi dan Misi Kabupaten Buton. Visi yang dimiliki Dinas Pertanian kabupaten Buton dalam rangka mengembangkakan sektor tanaman pangan dengan konsep agribisnisnya adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan distribusi yang merata dan harga terjangkau.

2. Meningkatkan produktivitas hasil tanaman pangan dengan cara meningkatkan mutu intensifikasi komoditas prioritas dan spesifik lokal.
3. Meningkatkan perluasan areal tanaman dengan menaikkan indeks pertanaman (IP) dan memanfaatkan lahan tidur, lahan genangan, lahan marginal, usaha tani konservasi dan intensifikasi di lahan perhutani.

Misi yang akan dilakukan pemerintah kabupaten Buton, dan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buton adalah melihat keadaan lahan melihat keadaan lahan di kabupaten buton dan di dorong untuk menyelamatkan keberadaan kawasan hutan dan pesisir pedesaan yang berbasis kultural. Dengan agenda kegiatan yaitu:

- a. Jurusan penghijauan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah
- b. Jurusan pertanian lahan kering termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan
- c. Jurusan industri kecil, kerajinan rakyat, pariwisata dan pertanabangan
- d. Jurusan pertambangan dan pemasaran hasil
- e. Jurusan kehidupan dan pertumbuhan koperasi / KUD serta menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton bahwa dengan lima dasar Misi diatas, diharapkan akan mampu memberdayakan potensi seluruh lapisan masyarakat, Kabupaten Buton/Kecamatan, tapi merata keseluruh wilayah di Kabupaten Buton.

Nama : H. Umar
 Pendidikan : SLTA
 Jabatan : Pengusaha Lokal di Kabupaten Buton
 Alamat : Paatwajo Kabupaten Buton
 Tanggal : 20 Desember 2008

Menurut H. Umar, Pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Buton karena dukungan pasar. Petani menanam karena pasarnya jelas. Melalui pasar pengusaha hasil bumi sangat kompetitif dalam menampung hasil-hasil pertanian. Sehingga terjadi pertukaran dan percepatan pertumbuhan masyarakat di bidang pertanian.

Nama : Ir. Hj. Wa Ode Nurjana, MSP
 Pendidikan : Strata Dua (S2)
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 Alamat : Pasarwajo Kabupaten Buton
 Tanggal : 10 Desember 2008

Kepala Sub Bidang Dinas Pertanian tanaman pangan mengemukakan pendapat mengenai kontribusi dari sektor pertanian tanaman pangan terhadap perekonomian daerah Kabupaten Buton yakni ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, para petani justru banyak menikmati hasil panennya, karena terjadi kenaikan harga di pasar lokal terutama pasar luar negeri. Khusus untuk kabupaten Buton, terlihat dari indikator PDRB bahwa kontribusi yang di berikan sektor pertanian sesungguhnya positif dan signifikan.

Pada aspek sosial terjadi adanya keinginan dari masyarakat setempat di kabupaten Buton untuk terlihat dan mengembangkan kehidupannya di sektor pertanian atau agribisnis ini secara tepat. Hal ini didasarkan atas pengalaman yang dialami bahwa sektor ini mampu memberikan kehidupan yang lebih baik dan terjadi peningkatan pendapat yang positif dan berarti. Masyarakat kabupaten Buton terhadap masyarakat kabupaten Buton termasuk masyarakat yang dinamis dan ulet sebagaimana masyarakat di Buton pada umumnya yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Keadaan tanah dan kondisi geografis yang sulit ini menjadikan masyarakat Buton menjadi indifido yang tekun dan tahan banting terhadap kesulitan hidup. Inilah yang menjadi modal dasar bagi pengembangan sektor agribisnis yang pada umumnya membutuhkan keuletan dan ketekunan dalam mengusahakannya. Mengenai faktor sosial yang hidup di masyarakat Buto sebagai berikut: "Sebagian besar masyarakat di Buton adalah ulet dan tekun disebabkan oleh karakter tanah yang keras dan tandus" namun ada kelemahan juga yaitu rasa cepat puas yang dimilikinya terhadap hasil panen yang dicapai pada suatu periode masa tanam.

Nama : Ir. Wayan Aryadi
 Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Dinas Pertanian Hortikultura

Alamat : Pasarwajo Kabupaten Buton

Tanggal : 10 Desember 2008

Kepala Sub Dinas Pertanian Hortikultura menjelaskan bahwa aspek teknologi yang merupakan tuntutan dan perkembangan dunia modern dengan ketersediaan peralatan pertanian pada era menjelang globalisasi dan penerapan perdagangan bebas dunia dewasa ini yang harus diantisipasi sejak awal, supaya mengoptimalkan sumber daya untuk memenangkan kompetisi yang dapat dilakukan. Penerapan teknologi disektor pertanian tanaman pangan pada kenyataan merupakan hal yang tak terhindari lagi (inevitabel). Kemajuan teknologi baik dari peralatan maupun segi varietas tanaman yang tersedia memberikan peluang bagi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, khususnya yang berlaku di kabupaten Buton.

Teknologi ternyata berkaitan dengan metode, teknik atau cara pengolahan pertanian yang dimiliki dan dikerjakan oleh para petani yang terlibat secara langsung dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kabupaten Buton. Teknik pengerjaan ini tentu berkaitan dengan tingkat produktivitas yang diperoleh atau dihasilkan oleh para petani pada tanaman pangan yang ada dan menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang ada di kabupaten Buton dan wilayah sekitarnya.

Ia menegaskan masalah teknologi yang terjadi dikalangan petani Buton adalah petani Buton pada umumnya telah menggunakan teknik penanaman yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi pertanian yang ada, namun upaya pengenalan dan penerapan teknologi guna umumnya lambat juga karna para petani tidak muda untuk mengubah kebiasaan menanam penggunaan pupuk yang selama ini dikenal. Pengembangan pupuk kompos dari hasil pengolahan sampah organik belum mendapat respon yang cepat dari para petani, karena kebiasaan menggunakan pupuk nonorganik.

Ia menambahkan sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten Buton adaslah lahan yang terdiri dari tanah tegalan dan tanah kering sehingga amat cocok untuk tanaman jangka panjang dan tanaman keras.

Nama : Lukman
 Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Jabatan : Pengusaha lokal di Kabupaten Buton
 Alamat : Pasarwajo Kabupaten Buton
 Tanggal : 10 Desember 2008

Menurutnya perkembangan politik yang berhubungan faktor ketertiban dan keamanan adalah sesungguhnya perkembangan Indonesia saat ini telah di perkirakan sebelumnya, sebagai akibat dari euforia reformasi dan demokrasi yang diterima secara dadakan. Namun yang di butuhkan dunia usaha saat ini adalah jaminan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan semestinya. Apalagi dunia usaha yang sedang mengalami kesulitan ini sering terganggu dengan aktivitas demo sehingga melumpuhkan jalur transportasi dan distribusi barang antar daerah di Buton. Pada hal di pihak lain dengan adanya UU No. 32 tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah yang luas merupakan peluang bagi daerah untuk pengembangan dan kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat secara penuh, sesuai dengan kebutuhan aspirasi yang berkembang. Hal ini tentu berlaku juga pada sektor pengembangan pertanian tanaman pangan yang berpotensi di kembangkan sebagai andalan bagi pemasukan kas daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD), sekali gus sektor ini bermanfaat bagi pergerakan ekonomi daerah yang nantinya dapat menjadi tumpuan bagi penyediaan lapangan kerja masyarakat di kabupaten Buton.

Nama : Salim
 Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Jabatan : Ketua koperasi bina desa
 Alamat : Pasarwajo Kabupaten Buton
 Tanggal : 10 Desember 2008

Beliau menjelaskan tentang strategi apa saja yang telah di kerjakan atau di lakukan selama ini oleh institusi berkompeten dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan kabupaten Buton, maka akan diteliti atau dianalisa program kerja dari Dinas

Pertanian Tanaman Pangan selama beberapa tahun terakhir ini dalam rangka pengembangan sektor pertanian atau agribisnis tanaman pangan di wilayah kabupaten Buton.

Strategi yang telah dilakukan pada waktu yang lalu oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai yang secara yuridis berkompeten dalam mengelolah perkembangan sektor pertanian tanaman pangan ini adalah antara lain: meningkatkan produktivitas hasil tanaman pangan melalui peningkatan mutu, intensifikasi komoditas, perluasan areal tanam dengan meningkatkan Indeks pertanaman, dan memanfaatkan lahan tidur, lahan genangan, lahan marginal, usaha tani konservasi dan intensifikasi di lahan perhutani, peningkatan perekonomian.

Ia menegaskan bahwa strategi yang di jalankan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan secara umum telah memenuhi syarat hanya saja upaya pemberdayaan terhadap para petani belum terlihat optimal karena kurang melibatkan peran dari koperasi sebagai wadah kerja para petani yang ada.

Nama : Wa Batina
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Jabatan : Pengusaha Tepung Singkong
 Alamat : Pasarwajo Kabupaten Buton
 Tanggal : 10 Desember 2008

Dalam wawancara ini di jelaskan bahwa kontribusi yang diberikan sektor pertanian terhadap komponen pendapatan pendapatan asli daerah (PAD) cukup positif. Jadi walaupun terjadi krisis ekonomi dari akhir tahun 1997 hingga sekarang, namun kontribusi yang di berikan oleh sektor pertanian cukup besar dan positif.

Di tambahkan bahwa kinerja yang telah di capai itu belumlah maksimal, di sebabkan oleh kurangnya atau keterbatasan dana pengembangan sektor pertanian yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan.